



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)



TAHUN 2017-2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia – Nya maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2020 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2020 ini merupakan bagian dari kegiatan, program dan kebijakan. Selain itu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2020 dibuat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu 2016 – 2020.

Kami menyadari RENSTRA yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2020 yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pengembangan dan penyempurnaan RENSTRA ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan internal khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya.

Putussibau, Juni 2019

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,



RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650129 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Perikanan	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23
BAB III PEMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN	
3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	31
3.3. Telaah Rentra Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....	35
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Trategis.....	40
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan.....	45

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi..... 53

5.2. Kebijakan 56

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan 63

6.2. Pendanaan..... 70

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perikanan 72

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan..... 76



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

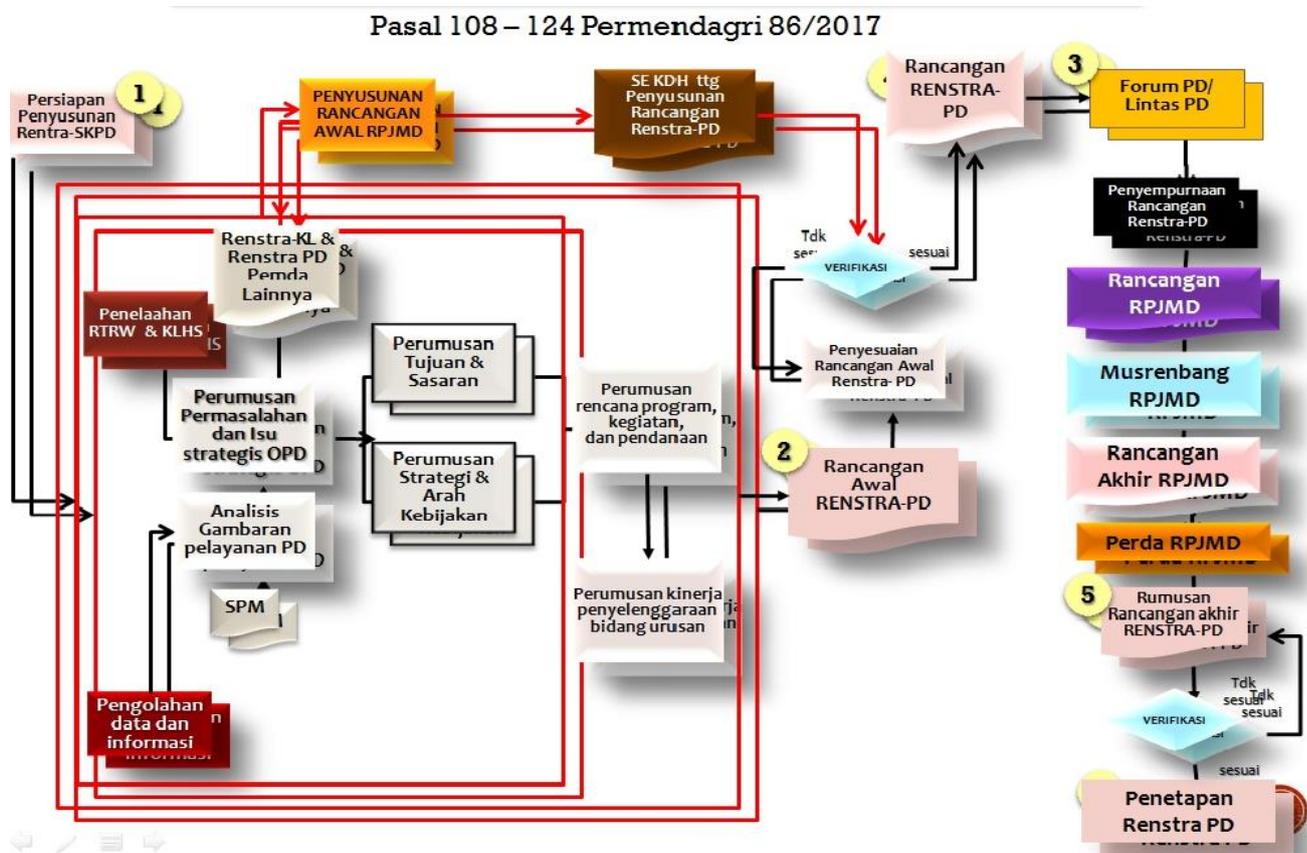
Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan Organisasi perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 - 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Perencanaan adalah upaya mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 - 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra
- b. Penyusunan rancangan Awal Renstra
- c. Penyusunan rancangan Renstra
- d. Pelaksanaan forum perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir renstra
- f. Penetapan Renstra Dinas Perikanan

Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara penyusunan Renstra PD

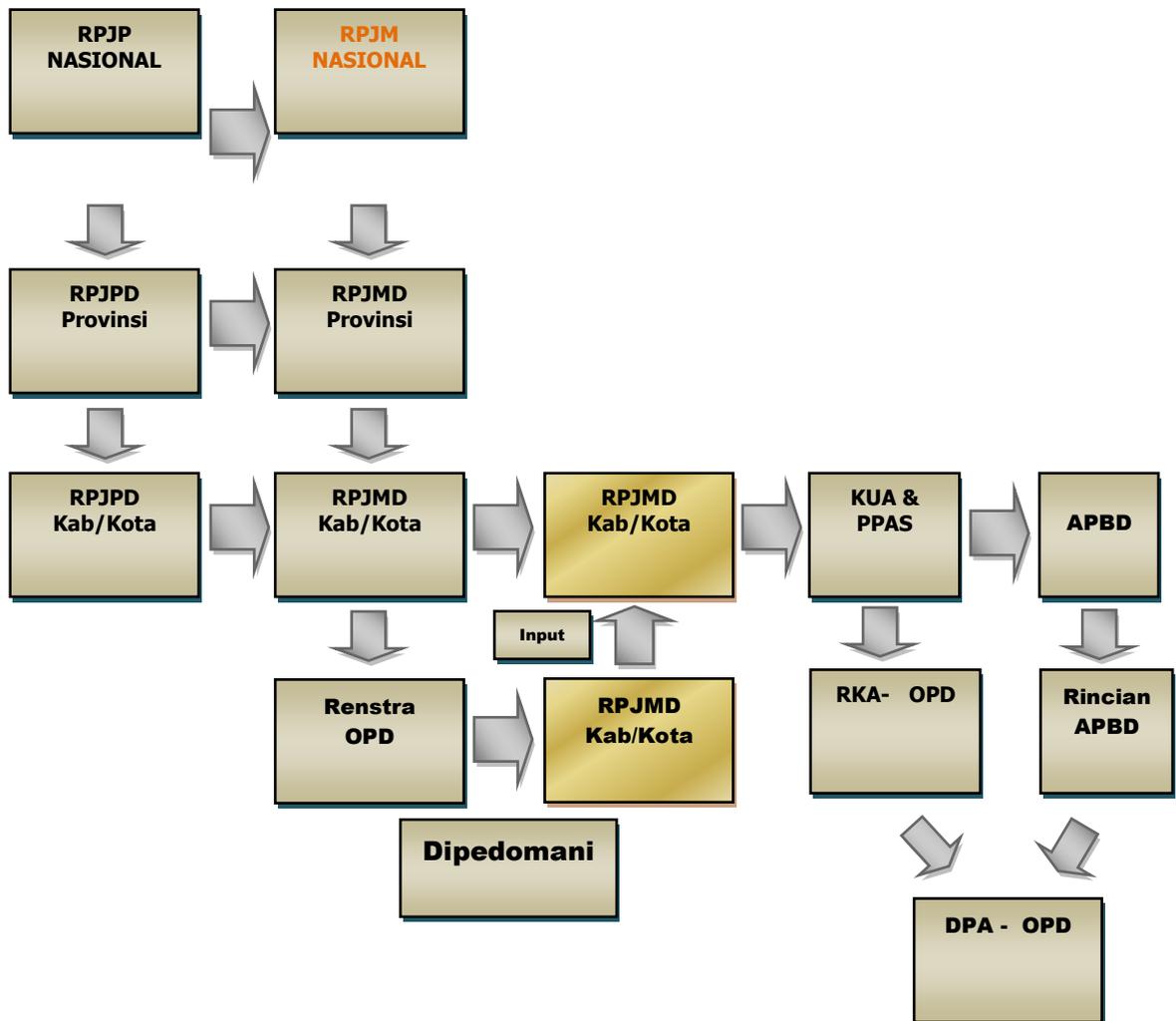


Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2021 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan perikanan dan kelautan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Renstra Dinas tingkat Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki Urgensi yaitu antara lain :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD.
2. Dasar Penilaian Kinerja Kepala SKP

Gambar 2.
Bagan Alir Hubungan Dokumen Perencanaan Startegis dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan resmi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan program-program strategis dan prioritas yang berbasis sumberdaya lokal;
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu;

6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan tolak ukur dalam menilai dan mengevaluasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Memungkinkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan komitmen pada kegiatan di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2021 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/Kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Tupoksinya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perikanan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 tanggal 7 November 2016, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat.
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil
 - a. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
5. Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Perikanan
 - b. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

(1) Sekretariat

Tugas Pokok: membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kerarsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil.

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil. Dengan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;

- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
- e. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil secara periodik;
- f. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Perikanan Budidaya.

Tugas Pokok: tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan. Dengan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan pernbudidaya kecil;
- d. pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perikanan Budidaya secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Tugas Pokok: tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan perikanan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Dengan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penguatan Kelembagaan perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan penyuluhan perikanan;
- d. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas: tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional.

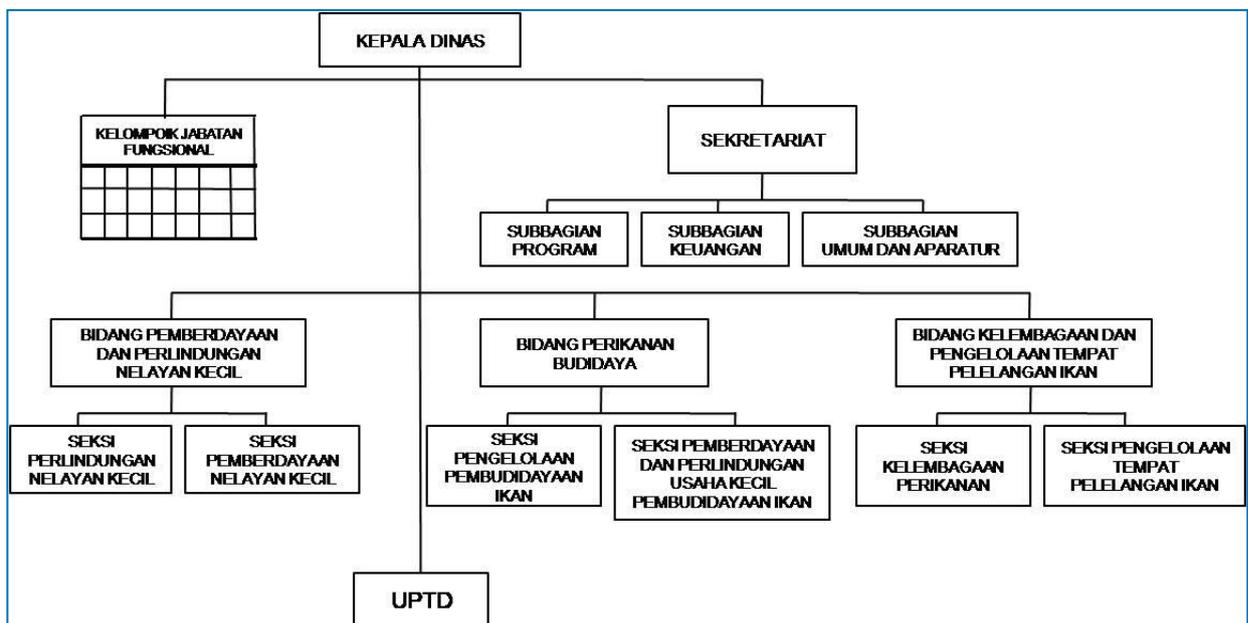
Tugas: Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63

tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perikanan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 3.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu



2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 55 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil/CPNS dengan jumlah 35 orang.
- 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:
 - a. Golongan I = 2 orang
 - b. Golongan II = 5 orang
 - c. Golongan III = 25 orang
 - d. Golongan IV = 3 orang
 - 2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:
 - a. S2 = 10 orang
 - b. S1 = 10 orang
 - c. D3 = 2 orang
 - d. S L T A = 11 orang
 - e. S L T P = 2 orang
 - 3) Dari segi Jabatan Struktural/ Eselon adalah sebagai berikut :
 - a. Eselon II = 1 Orang
 - b. Eselon III = 3 Orang
 - c. Eselon IV = 9 Orang
- b. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak
- Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang berjumlah 41 Orang Terdiri dari; Tenaga Administrasi Perkantoran 17 Orang, Petugas Kebersihan Kantor 2 Orang, Supir 3 Orang, Petugas BBI 9 Orang, Petugas TPI 8 Orang, Tenaga Teknis Lapangan 2 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :
- SARJANA = 17 Orang
 - S L T A = 23 Orang
 - S L T P = 1 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

Tabel 1. Sarana dan Prasarana yang ada Dinas Perikanan

No	Jenis Barang	Satuan	Jlh	Lokasi	Keterangan
1	Tanah	m ²	4	UPT-BI Kelansin dan Silat Hilir	UPT-BI Kelansin dan Silat Hilir
2	Instalasi PDAM/ PLN/ Telp.	Unit	1	Dinas Perikanan	
3	Bangunan :				
	a. Gedung Kantor	Unit	2	Putussibau, dan UPT-BI Kelansin	Kantor Dinas, BBI Kelansin, TPI Empaik dan TPI Jongkong
	b. Rumah Dinas	Unit	-	-	-
	c. Mess/ dll	Unit	1	UPT-BI Kelansin	
	d. Fasilitas umum	Unit	2	Empangau, Selimbau	Pondok wisata, Gedung pertemuan nelayan
4	Alat-alat Besar (Genset)	Unit	3	Dinas Perikanan, UPT-BI Kelansin	-
5	Alat Angkut				
	a. Mobil	Unit	4	Dinas Perikanan, dan UPT-BI Kelansin	Dinas Perikanan, BBI dan PBI
	b. Sepeda Motor	Unit	33	Dinas Perikanan, UPT-BI Kelansin, Jongkong, dan Suhaid	Tersebar
	c. Speed Boat	Unit	6	Dinas Perikanan, TPI Suhaid, TPI Jongkong, TPI Silat Hilir, Putussibau	Tesebar kebeberapa TPI
6	Alat Perikanan :				
	a. Tabung Oksigen	Buah	8	BBI kelansin	
	b. Serok	Buah	10	BBI kelansin	
	c. Waring	Buah	6	BBI kelansin	
	d. Aquarium	Buah	201	BBI kelansin	
	e. Blower	Buah	5	BBI kelansin	
	f. Batu Aerasi	Buah	20	BBI kelansin	
7	Peralatan Meubelair :				
	a. Meja kerja	Buah	84	Dinas Perikanan, BBI Kelansin	
	b. Meja Rapat (Kecil/ Besar)	Buah	12	Dinas Perikanan, BBI Kelansin	

	c. Meja/ Kursi Tamu	Set	6	Dinas Perikanan, BBI Kelansin	
	d. Kursi Rapat/ Kursi Kerja	Buah	282	Dinas Perikanan, BBI Kelansin	
	e. Filling Kabinet	Buah	3	Dinas Perikanan	
8	Peralatan Kantor :				
	a. Komputer	Unit	1	Dinas Perikanan dan BBI Kelansin	
	B Laptop	Unit	43	Dinas Perikanan dan BBI Kelansin	
	c. Proyektor	Unit	6	Dinas Perikanan dan UPT-BI Kelansin	
	d. UPS	Buah	5	Dinas Perikanan	
	e. Printer	Unit	50	Dinas Perikanan	
	f. Alat Pendingin (AC)	Unit	15	Dinas Perikanan	
	g. Brankas	Buah	1	Dinas Perikanan	
9	Alat-alat Studio	Jenis	35	Dinas Perikanan	
10	Alat-alat Komunikasi	Unit	1	Dinas Perikanan	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif, memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan

2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertical atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pencapaian target kinerja selama periode 2010 – 2015 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPL	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	Prosentase PDRB Sektor perikanan berdasarkan lapangan usaha (%)				5,77	5,80	5,95	6,00	6,15	5,77	5,60	5,41	9,85	2,97	100,00	96,55	90,92	164,17	48,29	
2.	Produksi Perikanan a. Produksi Perikanan Tangkap • Ikan Konsumsi/ Ton • Ikan Hias (Arwana, botia, ringau)/ekor b. Produksi Perikanan Budidaya • Ikan Konsumsi/Ton • Ikan Hias (Arwana)/ekor c. Produksi Benih (BBI & UPR)/ekor d. Sertifikasi Komoditas Ikan BBI Kelansin (jenis) e. Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)				19.915 10.000 10.790 4.000 200.000 1 9.000	22.690 11.000 13.670 5.500 350.000 0 10.000	24.690 12.000 15.510 7.000 400.000 0 11.500	27.440 14.000 18.250 8.500 550.000 0 13.500	30.180 15.000 19.850 10.000 600.000 1 15.700	30.180 15.000 19.850 10.000 600.000 1 15.700	20.635 4.050 9.844,3 8.713 97.470 1 10.046	29.458 21.700 8.351 8.818 120.170 0 10.535	34.636 79.500 9.615 6.988 135.800 0 10.687	35.013 7.000 10.335 9.337 498.480 0 11.166	18.548 0 16.150 9.337 60.127 2 14.166	103.62 40.05 89.74 217.83 48.735 100.00 111.62	129.83 197.27 61.09 160.33 34.33 0.00 80.86	140.28 662.50 61.99 99.83 33.95 0.00 92.92	127.60 50.00 56.63 109.85 90.63 0.00 82.71	61.46 0.00 81.36 93.37 10.02 200.00 90.23
Indikator Kinerja Lainnya																				
1.	Meningkatnya peranan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah a. PAD Sektor Perikanan (Juta) b. Pendapatan Masyarakat Perikanan - Rata-rata pendapatan Nelayan (rupiah/bulan) - Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan (rupiah/bulan) - Rata-rata pendapatan Masyarakat Pengolah (rupiah/bulan)				75.000 1.220.000 950.000 1.100.000	50.000 1.342.000 1.100.000 1.250.000	75.000 1.476.200 1.200.000 1.350.000	95.000 1.623.820 1.400.000 1.450.000	120.000 1.786.200 1.600.000 1.650.000	72.585 1.211.000 850.000 1.1250.000	64.776 1.457.000 900.000 1.370.000	96.847 1.710.000 900.000 1.420.000	90.429 1.650.000 1.100.000 1.500.000	25.495 1.150.000 1.250.000 1.500.000	96.78 99,26 89,47 102,27	129,55 108,57 81,82 109,60	129,13 115,84 75,00 105,19	95,19 101,61 78,57 103,45	21,25 64,38 78,13 90,91	
2.	Peningkatan SDM Perikanan a. Aparatur Perikanan (orang) b. Masyarakat Perikanan • Cakupan bina Kelompok nelayan (KUB) • Cakupan bina Kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) • Cakupan bina Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)				5 42 150 70	5 46 165 90	7 51 178 100	6 57 182 120	8 63 191 150	6 55 112 85	8 165 98 65	7 65 98 65	9 92 412 153	6 58 12 115	120 130 74,67 121,43	160 358,70 59,39 72,22	100 127,45 55,06 65,00	112,5 161,40 226,37 127,50	75,00 92,06 6,28 76,67	
3.	Meningkatnya kegiatan Promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan a. Ekspor produk perikanan yang terawasi melalui PLB badau /Ton				20 20	25 25	30 30	35 35	50 50	22,1 22,1	26,4 26,4	39,88 39,88	75,03 75,03	69,77 69,77	132,00 132,00	105,60 105,60	132,93 132,93	214,93 214,93	139,54 139,54	
4.	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan a. Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan pengrusakan sumberdaya ikan & lingkungan (%) b. Luas kawasan Konservasi perairan/Danau Lindung yg dikelola secara berkelanjutan (Ha) d. Jumlah Ikan yang direstocking				50 301.000 75.200	40 363.000 120.000	30 401.000 0	20 417.000 0	15 456.000 0	29 352.000 27.000	32 308.843 70.714	32 450.843 4	32 498.840 0	16 498.000 0	58,00 102,60 35,904	80,00 112,63 58,93	106,67 112,43 0,00	160,00 119,63 0,00	106,67 109,21 0,00	

Berdasarkan pada tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Selama periode tahun 2011-2015, capaian kinerja perikanan ditandai dengan tercapainya beberapa target Indikator Kinerja Dinas Perikanan, yakni pada PDRB pada kelompok pertanian subsektor perikanan 2010 sebesar 5,91 % menjadi 7,90% pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, capaian sementara rata-rata konsumsi ikan perkapita Kabupaten Kapuas Hulu adalah 37,00 kg/kapita atau terjadi penurunan sebesar (6,47 kg perkapita Tahun 2014), (3,29 kg perkapita Tahun 2013), (3,23 kg perkapita tahun 2011). Penurunan konsumsi ikan perkapita Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015 menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan untuk dikonsumsi belum tersedia cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu, padahal jika melihat potensi perairan umum diKapuas Hulu Sangat Besar. Selain itu penurunan konsumsi ikan per kapita disebabkan oleh belum meratanya distribusi, suplai dan tidak kontinyu, masih banyak produk yang berkualitas kurang prima dipasaran, kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat makan ikan, banyak produk perikanan yang keluar dari kapuas hulu, serta meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu.

Produksi perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 29,04% pertahun, yakni dari 45.099,70 ton pada tahun 2014 menjadi 34.949,83 ton pada tahun 2015. produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya dan produksi tangkap diperairan umum, untuk Produksi perikanan budidaya selama tahun 2015 mencapai 16.401,13 ton dan mengalami kenaikan menjadi 6.314,78 ton

tahun 2014 (KDA Kapuas Hulu, 2015). Sedangkan produksi perikanan tangkap diperairan umum menurun secara signifikan sebesar 52,98 %, selama tahun 2015 mencapai 18.548,70 ton dan mengalami penurunan menjadi 35.013,35 ton tahun 2015 (KDA Kapuas Hulu, 2015).

Produktivitas hasil BBI Kalansin sangat rendah, hal ini terlihat dari total produksi benih yang dihasilkan hanya mencapai 60.200 ekor selama tahun 2015. Produksi benih yang cukup baik hanya terlihat pada komoditas ikan bawal, padahal disisi lain komoditas ini tidak direkomendasikan untuk dikembangbiakkan (terutama untuk pembesaran di karamba di perairan umum) karena merupakan ikan introduksi yang memiliki karakteristik biologi yang dapat mengancam keberadaan spesies ikan lokal jika dikembangbiak secara bebas di alam. Produktivitas produksi ikan jelawat, ikan mas, ikan patin, ikan lele, dumbo dan ikan lainnya semestinya dapat ditingkatkan karena rata-rata produksi tiap siklus produktivitas ikan tersebut semestinya dapat mencapai puluhan ribu anakan ikan tiap kali pemijahan.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya ini menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan di Kabupaten Kapuas Hulu, selama kurun waktu 2014-2015, volume produk olahan meningkat dari 11.166 ton pada tahun 2014 menjadi 14,166 ton pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap ragam produk olahan bernilai tambah yang dihasilkan Unit Pengolahan Ikan Skala Rumah Tangga dalam upaya memenuhi preferensi konsumen terhadap diversifikasi produk perikanan yang bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah. Adapun jenis produk olahan yang dihasilkan berupa: Kerupuk Ikan, Kerupuk Basah, Ikan Asin, Ikan Salai, dan Ikan Pedas.

Pada pos anggaran pendapatan asli daerah dari hasil retribusi daerah, diperoleh rata-rata rasio antara target pendapatan retribusi daerah dengan realisasi pendapatan mencapai rata-rata sebesar 100% selama pelaksanaan periode renstra Dinas Perikanan yang sebelumnya Pada pos anggaran pendapatan asli daerah dari lain-lain PAD yang sah, diperoleh rata-rata rasio antara target pendapatan dengan realisasi mendapatkan mencapai rata-rata sebesar 99,07% selama pelaksanaan periode renstra Dinas Perikanan sebelumnya, meskipun pada tahun pertama periode renstra yaitu pada tahun 2011 rasio antara realisasi dan anggaran hanya mencapai 95,35 %

Dari laporan Ekspor Produk Perikanan di Pos Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Badau tahun 2015 adalah sebesar 69.77 Ton yang terdiri dari ikan segar, Produk olahan ikan Asap/Salai dan ikan Hias botia, Namun terjadi penurunan bila dibandingkan jumlah ekspor pada tahun 2014 yaitu sebesar 75.033 kg atau terjadi penurunan sebesar 5.262 Kg atau 7,71%.

Tabel. 3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD																	
1. Belanja Langsung	9.916	12.464	16.566	19.527	24.713	9.780	12.092	16.391	18.757	24.204	98.63	97.02	98.94	96.06	97.94		
2. Belanja Tidak Langsung	1.157	1.754	2.335	2.513	3.011	1.146	1.616	2.184	2.310	2.897	99.05	92.15	93.53	91.91	96.21		
APBN																	
1. Dekonsentrasi																	
2. Tugas Pembantuan	331,504					331,504					100,00						

Berdasarkan pada tabel 10 diatas maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada pos anggaran belanja daerah khususnya pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 98,85%
2. Pada pos anggaran belanja daerah khususnya pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 97,30%. Capaian rasio penyerapan anggaran ini dipengaruhi sedikitnya penyerapan realisasi pagu anggaran pada tahun 2014 dimana rasio realisasi dengan pagu anggaran hanya sebesar 78,11%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Salah satu kegiatan yang penting dalam Perencanaan Strategis adalah identifikasi dan/atau klarifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi sebagai faktor lingkungan internal organisasi. Sementara itu faktor peluang dan ancaman yang dihadapi dan/atau harus diatasi suatu organisasi disebut lingkungan eksternal. Sebagai institusi publik Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Dinas Perikanan dihadapkan pada sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan secara serius dan komprehensif. Oleh karena itu secara kelembagaan Dinas Perikanan harus mampu memetakan berbagai faktor baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam rangka pengupayakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis SWOT adalah suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT adalah akronim dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threat* (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Secara umum Analisis SWOT sudah dikenal oleh sebagian besar Tim Perencana Penyusunan Rencana Strategis.

Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dengan faktor-faktor

eksternal yaitu peluang dan ancaman". Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah memanfaatkan peluang/ *Opportunities* (O) dan kekuatan/ *Strength* (S). Analisis ini diharapkan membuahakan rencana jangka panjang, mengatasi atau mengurangi ancaman/ *Threat* (T) dan kelemahan/ *Weakness* (W). Analisis ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan (*short-term improvement plan*). Analisis SWOT memungkinkan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi. Dengan analisis SWOT informasi dikumpulkan dan dianalisis. Hasil analisis SWOT dapat menjadi bahan untuk melakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi organisasi yang sedang berjalan. Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki, maupun segala kelemahan yang ada.

Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor internal, merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Di lain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan dihadapi yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi usaha yang dilakukan.

a. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan adalah faktor internal yang positif terhadap organisasi. Kekuatan merupakan sumber daya relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau yang akan dilayani.

Dalam hal ini, Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang dimiliki Dinas Perikanan.

b. *Weaknes* (Kelemahan)

Kelemahan adalah faktor internal yang negatif terhadap organisasi. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan sumber daya atau kapabilitas relatif suatu organisasi dibandingkan pesaingnya. Dalam hal ini yang menghambat kinerja efektif di Dinas Perikanan.

c. *Opportunity* (Peluang)

Peluang adalah faktor eksternal positif organisasi. Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan di lingkungan Dinas Perikanan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara organisasi dengan penerima layanan.

d. *Threat* (Ancaman)

Ancaman adalah faktor eksternal negatif terhadap organisasi. Ancaman merupakan situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi, karena pengganggu utama bagi posisi saat ini dan pencapaian tujuan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi pelaksanaan program yang sedang dan akan berjalan di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan, khususnya pada sektor perikanan.

Guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

A. Isu strategis tingkat OPD :

1. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Rendahnya pendapatan nelayan tangkap disektor Hulu.
3. Rendahnya pendapatan pembudidaya disektor Hulu.
4. Rendahnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan disektor Hilir (Pengumpul, distributor, Jasa Angkutan/Logistik ikan, Pengolah/Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.

B. Isu strategis tingkat Bidang :

1. Rendahnya kontribusi UPR /Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas.

2. Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas.
3. Rendahnya Jaminan Ketersediaan Pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya yang terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah Tangga dan unit Pengolah Hasil ikan)
4. Berkurang bahkan menghilangnya beberapa Jenis ikan Endemik Kualitas ekspor dan atau bernilai ekonomi Tinggi, seperti ikan Arwana, Ringau, Belidak dan lain-lain dari PUD

Tabel 3.1 Permasalahan OPD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penyebab Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rendahnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik	Rendahnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, sarana dan prasarana, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya budaya integritas dan budaya kinerja aparatur 2. Kurangnya profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Rendahnya Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 4. Belum tersedianya data yang akurat dan terbaru 5. Kurangnya pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 6. Rendahnya standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi 7. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai 8. Belum dilakukan pengukuran kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkala
2	Kesejahteraan nelayan tangkap masih rendah	Rendahnya Pendapatan Nelayan Tangkap di Sektor Hulu	Rendahnya produksi ikan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya potensi/stok ikan tangkap di PUD 2. Berkurangnya pendapatan rumah tangga nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk pemulihan sumber daya ikan 3. Kurangnya partisipasi kelembagaan nelayan dalam pembangunan perikanan 4. Rendahnya kualitas pemukiman nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan perikanan 5. Rendahnya produksi ikan tangkap pada perairan berbasis CBF 6. Belum ada pembatasan penangkapan dan sosialisasi budidaya yang tidak lestari,

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)	Faktor Penyebab Akar Masalah (5)
3	Kesejahteraan pembudidaya masih rendah	Rendahnya pendapatan Pembudidaya di Sektor Hulu	Rendahnya produksi perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kapasitas sarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat 2. Kurangnya keterampilan pembudidaya 3. Rendahnya produksi ikan pada kawasan budidaya terpadu 4. Rendahnya produksi ikan pada budidaya berbasis CBF 5. Rendahnya produksi ikan pada kawasan budidaya minapadi 6. Rendahnya produksi ikan pada kawasan budidaya kemitraan, lintas sektor (Kampung KB, P2WKSS,/BBGR, Pemerintah Desa 7. Kurangnya pengawasan Perikanan Budidaya yang meliputi peredaran pakan dan obat-obatan serta kesehatan lingkungan 8. Belum teridentifikasi, terinvestigasi dan tersusunnya proposal perbaikan atas kasus penurunan produktivitas budidaya tertentu
4	Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan (pengumpul. Distributor, jasa angkautan/logsitik ikan ,pengolah/ pedagang ikan dan pengolah hasil perikanan)	Rendahnya pendapatan pelaku usaha perikanan di sektor hilir (pengumpul. Distributor, jasa angkautan/logsitik ikan ,pengolah/ pedagang ikan dan pengolah hasil perikanan)	Kurangnya ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan calon instruktur sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan, ketersediaan modul ajar dan prasarana/ sarana/ peralatan penunjang pelatihan dan pelaksanaan yang berpengalaman dalam mengelola pelatihan 2. Kurangnya keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan dalam membuat produk 3. Kurangnya kemampuan pengolah hasil perikanan dalam mengelola usaha 4. Rendahnya kemandirian kelompok pengolah dalam mengolah usaha 5. Kurangnya ragam jenis dan nilai produk yang dapat di pasarkan oleh kelompok pengolah 6. Kurangnya mutu produk perikanan
5	UPR/Pokdakan masih belum aktif	Rendahnya kontribusi UPR /Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas.	Rendahnya produksi benih dan pakan unit pembenihan rakyat (UPR/UP2R) dan Pembudidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya bantuan sarana/prasarana produksi benih untuk UPR dan Pokdakan 2. Kurangnya keterampilan UPR dan Pokdakan dalam produksi benih dan pakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penyebab Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kebutuhan benih masih kurang	Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas.	Rendahnya produksi dan kualitas produksi di Balai Benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produksi bibit dan intensitas inspeksi mutu produksi benih 2. Kurangnya ragam/jenis ikan, pakan yang diuji coba/ produksi, pelayanan diagnosa penyakit/ penjabatan penyakit ikan dan pengamatan kualitas air 3. Belum dilaksanakan pembangunan/ pengadaan baru atau peningkatan prasarana/sarana Balai Benih Ikan Kelansin 4. Kurangnya debit air masuk ke instalasi minimal 3 tahun ini, dan meningkatnya debit air masuk sekurang - kurangnya 3 tahun dari saat ini
7	Harga ikan di pasar Kapuas Hulu masih mahal	Rendahnya jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya yang terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah Tangga dan unit Pengolah Hasil ikan)	Rendahnya pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersediannya perangkat lunak dan perangkat keras sistem logistik ikan di koridor I,II dan III secara bertahap 2. Belum adanya monitoring, evaluasi, investigasi pelaksanaan SLID 3. rendahnya pelayanan bongkar muat, pelelangan ikan, penarikan retribusi perikanan dan laporan data perikanan yang masuk pelabuhan semakin baik 4. kurangnya pembangunan dan pengelolaan baik baru atau peningkatan (rehabilitasi) sesuai dengan RUP yang telah ditetapkan
8		Berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD	Rendahnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya ragam/jenis dan jumlah populasi masing - masing jenis ikan endemik pada pusat penangkaran 2. Belum dilakukan fasilitasi pembentukan dan rapat - rapat instalasi lintas sektor (Pokja) untuk merumuskan suatu kebijakan terkait upaya penyelamatan danau yang dilakukan secara bersama - sama 3. Belum adanya draf peraturan - peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan di perairan umum daratan 4. kurangnya peran serta POKMASWAS dan aparaturnya penegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang ingin diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Kapuas Hulu dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijabarkan sebagaimana berikut : Visi Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yaitu :

**“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA,
BERDAYA SAING DAN HARMONIS ”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang dikalangan pemangku kepentingan

(*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) kedepan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan

mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas;

2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80% rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan

3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan Tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran (*objective*) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai di Bidang Perikanan secara sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD 2017 - 2021 adalah sebagai berikut : (a) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dan (b) Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya/nelayan/pengolah, melalui peningkatan daya saing sektor perikanan, dengan indikator kinerja berupa kontribusi sektor perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan yang sekaligus sebagai implementasi misi kedua Bupati yaitu "MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN"

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada urusan Perikanan dan Kelautan adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan

pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP). Dan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Nilai Tukar Nelayan (NTN)
- b) Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)
- c) Presentase pemenuhan benih ikan bagi masyarakat
- d) Harga jual ikan segar, beku dan produk olahan lainnya di tingkat konsumen stabil (serta nilai inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank Indonesia)
- e) Nilai Tukar Pengolah Hasil
- f) Jumlah keberagaman jenis endemik sebagai plasma nutfah yang dilindungi dari kepunahan
- g) Prosentase penurunan jumlah laporan kasus pelanggaran sektor perikanan (Illegal, Uported and Unregulated Fishing)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi Visi dan misi, tujuan, sasaran dan permasalahan serta program-program prioritas yang telah di susun dan di tetapkan oleh pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat.

3.3.1. Telaahan Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah **“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT ”**

Dengan Misi (1). Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan PPK secara terpadu dan berkelanjutan., (2). Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan, (3). Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan. (4). Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan., (5). Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

Sasaran Produksi Perikanan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah 168.843,45 ton. Sasaran harus dicapai tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh SKPD Kabupaten /kota dengan SKPD Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Potensi pendukung utama dalam pengembangan perikanan yaitu budidaya perikanan tangkap adalah keberadaan sungai-sungai terutama sungai Kapuas, berdasarkan Renstra SKPD Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang mencapai 1.086 Km yang mana sepanjang 942 Km-nya dapat dilayari, sungai ini melalui beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan Kota Pontianak. Selain tiga Kabupaten yang dilalui Sungai Kapuas, Kabupaten lainnya juga secara umum yang memiliki sungai relatif panjang dan lebar. Kabupaten Sintang dengan Sungai Melawinya dimana panjangnya sekitar 471 Km, Kabupaten Sambas dengan sungai Sambas-nya 233 Km, Kabupaten Ketapang dengan Sungai

Pawan dengan panjang 197 Km, Sungai Kendawangan (128 km), Kabupaten Sanggau dengan Sungai Sekayam (221 Km) dan Kabupaten Pontianak dengan sungai Landak dengan panjang 178 Km serta masih banyak sungai lainnya yang melalui beberapa Kabupaten di Provinsi ini. Untuk danau jumlahnya cukup banyak, yang tersebar di beberapa Kabupaten dan danau yang memiliki luas cukup berarti terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Danau Sentarum (sekitar 117.500 Ha) dan Danau Luar sekitar 5.400 Ha. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Sedangkan permasalahan yang perlu ditinjau dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai adalah *Illegal fishing*, permodalan, Kualitas SDM, harga pakan, sarana dan prasarana produksi, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran. Permasalahan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan koordinasi lintas wilayah dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat antara lain peningkatan produksi spesifik daerah dengan penerapan teknologi dan benih unggulan, pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, pemanfaatan lahan masyarakat dan pengembangan kawasan untuk mendukung usaha nelayan dan pembudidaya. Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program (1). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (2). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap, (3). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya, (4). Program Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan, (5).Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: (1). **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. (2). **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. (3). **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1). **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan**, dilaksanakan dengan strategi a) Memberantas *IUU Fishing*, b) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi, c) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan (2). **Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing,**

dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut

a) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir , b). Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), c). Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap d). Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD), e) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan, f) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan, g) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan, h) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil.

Kebijakan yang (3). **Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan**, dilaksanakan dengan strategi yaitu: **a)** Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, **b)** Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, **c)** Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan, **d)** Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, **e).** Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan. Arah kebijakan, strategi tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni Program Pengelolaan Ruang Laut, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap , Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Kajian Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 - 2034 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, kawasan peruntukan pertambangan serta pariwisata.

Kawasan perikanan yang terdapat pada Perda Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014, diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, serta kawasan pengolahan ikan.

Yang dimaksud dengan kawasan pengolahan ikan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang mengolah hasil perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya perikanan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup strategis adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan ijin pengelolaan lahan. KHLS ini tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KHLS dalam penyusunan atau evaluasi (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah

(RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kerangka kerja (*framework*) pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan hidup. Dengan menggunakan KHLs, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh kedepan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Selain itu KHLs juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas

dan fungsi organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan bagi organisasi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Rendahnya pendapatan nelayan tangkap di sektor hulu. Menurunnya pendapatan pelaku usaha perikanan yang diindikasikan dari menurunnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dari 3,33 % pada tahun 2011; menjadi 3,19% pada tahun 2012; seterusnya menjadi 3,05% pada tahun 2013 dan tahun 2014 dan menjadi 2,99% pada tahun 2015.
2. Rendahnya pendapatan pembudidaya di sektor hulu. Menurunnya pendapatan pelaku usaha perikanan, berarti pula menurunnya pendapatan pelaku usaha perikanan di sektor hulu, yaitu nelayan yang pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan di sektor hilir yaitu para pengumpul eceran di tingkat produksi, pusat pengumpul di tempat pendaratan ikan, distributor, pengolah hasil perikanan, pedagang dan pengecer ikan
3. Rendahnya pendapatan pelaku usaha perikanan di sektor hilir (Pengumpul distributor, jasa angkutan/logistik ikan, pengolah/pedagang ikan dan pengolahan hasil perikanan). Menurunnya produktifitas usaha di sektor hilir tidak saja disebabkan oleh pasokan ikan segar dan beku yang tidak stabil dan kualitas yang tidak sesuai untuk produk olahan disebabkan oleh kurangnya sarana usaha yang tidak dimiliki, pengetahuan dan keterampilan teknis dan kewirausahawan yang terbatas,

serta aspek kelembagaan, permodalan dan pemasaran yang tidak memadai;

4. Rendahnya kontribusi UPR/Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas. UPR maupun Pokadakan belum bisa memenuhi kebutuhan bibit dapat disebabkan masih kurangnya kemampuan dan skill untuk melakukan pemijahan ikan baik secara alami maupun intensif. Selain itu kualitas bibit yang dihasilkan kurang memenuhi standar yang diinginkan;
5. Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas. Produktivitas hasil BBI Kalansin sangat rendah, hal ini terlihat dari total produksi benih yang dihasilkan hanya mencapai 60.200 ekor selama tahun 2015. Produksi benih yang cukup baik hanya terlihat pada komoditas ikan bawal, padahal disisi lain komoditas ini tidak direkomendasikan untuk dikembangbiakkan (terutama untuk pembesaran di karamba di perairan umum) karena merupakan ikan introduksi yang memiliki karakteristik biologi yang dapat mengancam keberadaan spesies ikan lokal jika berkembangbiak secara bebas di alam;
6. Rendahnya jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya dapat terjangkau pada tingkat konsumen (rumah tangga dan unit pengolah hasil ikan). Belum terbangunnya sistem logistik ikan, sehingga menyebabkan ikan beku dan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya di Kapuas Hulu, tidak dapat di distribusikan kepada unit pengolah dan konsumen dengan pasokan yang stabil dan kualitas yang baik. Kondisi ini berimplikasi terhadap rendahnya diversifikasi produk olahan, karena tidak adanya bahan baku yang berkualitas. Dan multi effekekonomidari produksi ikan di

hulu tidak mengalir ke sektor hilir, Sehingga pertumbuhan PDRB di sektor hilir menjadi tidak optimal; dan

7. Berkurangnya bahkan menghilangnya beberapa jenis ikan hias endemik kualitas ekspor seperti Arwana Red, ikan Ringaw, Ulang uli (Botia), dan ikan konsumsi kualitas ekspor seperti semah dan ikan konsumsi bernilai ekonomi seperti Belidak, Jelawat, Udang galah dan lain-lain di perairan umum daratan (PUD).

IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perikanan

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021, adalah acuan utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategis OPD masing-masing. Penetapan tujuan dan sasaran pada tingkat OPD sebagaimana termaktub didalam Rencana Strategis Dinas yang hasil akhirnya tidak bermuara pada Sasaran dan Tujuan sebagaimana telah ditetapkan di RPJMD, dapat dinilai sebagai perencanaan yang tidak tepat sasaran. Demikian pula terhadap anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayainya dapat juga dinilai sebagai pemborosan keuangan Negara, sehingga berpotensi dinilai menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Oleh karena itu, analisis sejauhmana tujuan Renstra ini memiliki relevansi dan konektivitas terhadap indikator sasaran di dalam RPJMD, adalah langkah awal yang penting untuk dilakukan dalam pembahasan latar belakang Renstra ini.

Visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017-2021 adalah Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis. Untuk mengaktualisasikan visi dimaksud, ditetapkan tiga Misi. Misi 1 RPJMD yakni memperkuat tata kelola Pemerintah yang lebih baik dan bersih. Misi tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, akuntabilitas dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam menjalankan tujuan tersebut maka diuraikan dalam 3 sasaran RPJMD yakni meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah ; meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menjawab ketiga sasaran tersebut maka Dinas Perikanan menentukan tujuan Dinas Perikanan kedalam Renstra yakni Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel dan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun sasaran yang akan dicapai tersebut adalah dengan meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik dengan indikator predikat SAKIP pada Dinas Perikanan.

Misi ke 2 ; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sumberdaya Daerah yang Berkelanjutan. Untuk mencapai Misi ke 2 yang menekankan pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat ini maka (masih dalam tingkatan makro/RPJMD) ditetapkan pula beberapa tujuan pembangunan daerah. Dan setiap tujuan pembangunan daerah ditetapkan sasaran dan indicator sasaran yang harus dicapai. Indikator sasaran pembangunan daerah yang sebagaimana tetapkan di dalam RPJMD inilah menjadi arah, fokus dan sekaligus goal ahir bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas.

Adapun Tujuan pembangunan daerah (Tujuan 2 RPJMD) adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dengan indikatornya adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%). Lebih lanjut, tujuan ke2 dari Misi 2 RPJMD ini, di prioritaskan pada Sasaran (Sasaran ke 3 RPJMD) ; Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dengan indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi sector yang ditunjukkan secara kuantitatif dalam persentase. (seperti sector Pertanian; perkebunan dan Perikanan). Indikator laju pertumbuhan Ekonomi sector perikanan (%), inilah selanjutnya menjadi goal ahir yang harus dicapai oleh OPD terkait. Oleh karena itu maka pilihan tujuan yang ditetapkan ditingkat OPD (tujuan didalam Renstra) haruslah tujuan yang hasil ahirnya diarahkan atau terarah kepada

factor-faktor/kinerja yang terkait secara langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sector perikanan.

Untuk mencapai sasaran makro (sasaran tingkatan Daerah) yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi sector perikanan tersebut, maka tujuan strategis pada tingkat OPD (Rencana Strategis Dinas Perikanan) haruslah diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha sector perikanan melalui upaya peningkatan produktifitas unit-unit ekonomi sector perikanan. Dan upaya peningkatan produktifitas unit-unit ekonomi sector perikanan ini berarti pula adalah perbaikan dan atau peningkatan kinerja sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasarannya termasuk isu kerusakan lingkungan yang melingkupinya. Dengan adanya peningkatan kinerja sarana produksi, distribusi dan pemasaran termasuk perbaikan kerusakan lingkungan pada unit-unit ekonomi tersebut maka kemampuan menghasilkan barang dan jasa unit-unit ekonomi ini akan makin meningkat, yang berarti pula Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sector perikanan dari tahun ketahun akan meningkat. Nilai pertambahan PDRB dari tahun ketahun inilah selanjutnya disebut Laju Pertumbuhan Ekonomi yang tahun ini ditargetkan didalam RPJMD tahun 2017-2021 sebesar 6,2% pertahun.

Dalam rangka pencapaian sasaran Makro sebagaimana dipaparkan di atas yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector unggulan Daerah dengan Target Indicator Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Sector Perikanan sebesar 6,02%, maka Tujuan pada tingkat operasional di OPD yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2017-2021, tidak saja membutuh pilihan arah kebijakan yang tepat juga membutuh dukungan anggaran yang relevan sesuai dengan target Indicator Sasaran Makronya. Terkait dengan penetapan Tujuan (Hasil/Dampak dari program) yang hendak di capai ditingkat Rencana Strategis Dinas, maka pilihan kebijakannya adalah diarahkan kepada actor dan faktor utama yang paling berpengaruh pada unit ekonomi sector, terutama didalam

mewujudkan dan meningkatkan nilai tambah barang dan jasa (PDRB). Oleh karena itu, Tujuan yang hendak dicapai didalam pembangunan sector Perikanan adalah ditujukan, Pertama; pada upaya untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraan para Pelaku usaha sector produksi hulu (Nelayan dan Pembudidaya) yang selanjutnya menjadi tujuan strategis 1 yaitu meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, dengan indicator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kedua; menjadi tujuan strategis 2 yaitu Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,dengan Indikator Nilai Tukar Pembudidaya (NTP). Ketiga; diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan Pelaku usaha sector produksi hilir,(Pengolah hasil perikanan) selanjutnya menjadi Tujuan Strategis 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan para Pengolah hasil ikan dengan Indikator Nilai Tukar Pengolah Hasil Ikan (NTPe) dan tujuan strategis 4 meningkatkan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan dengan indikator harga jual ikan segar, beku dan produk olahan di tingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI).

Guna merealisasikan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka tujuan serta sasaran tersebut perlu ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah ;
3. Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan

Sedangkan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik ;
2. Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ;
3. Meningkatnya pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan harga terjangkau di tingkat konsumen dan pengolah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 – 2021 secara lengkap termuat dalam Tabel 4.1 di bawah :

Tabel 4.1
Matrik Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Perikanan			Sasaran Dinas Perikanan				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator			
1	Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	1	Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah	1	Rata – rata pendapatan nelayan	1	Meningkatnya pendapatan nelayan	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		2	Rata – rata pendapatan pembudidaya			2	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)
		3	Rata – rata pendapatan pembudidaya			3	Nilai Tukar Pengolah (NTPe)
3	Meningkatkan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	1	Angka pasokan ikan (%)	1	Meningkatnya pasokan ikan berkualitas stabil dan harga terjangkau ditingkat konsumen dan unit pengolah	1	Harga jual ikan segar, beku dan produk olahan ditingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI)
						2	Angka pasokan ikan (%)

Secara terinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan yang akan dicapai tahun 2017 - 2021 sebagaimana tersebut pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan T.A 2017 - 2021

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	C	C	B	B	BB	BB	BB
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	n/a	n/a	n/a	103	104	105	105
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)	n/a	n/a	n/a	100	101	102	102
4	Nilai Tukar Pengolah Ikan (NTPe)	n/a	n/a	n/a	105	106	107	107
6	Harga jual ikan segar, beku dan produk olahan ditingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI)	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
5	Angka pasokan ikan (%)	n/a	n/a	n/a	3	5	7	7



STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Guna mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan Kinerja. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan program, dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakat pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sektor perikanan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2021 Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi yang ada pada Dinas Perikanan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor perikanan. Maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dimuat dalam Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD		: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS		
MISI RPJMD		: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Meningkatnya pendapatan nelayan	Meningkatkan produksi ikan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2. Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perikanan umum daratan (PUD)
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2. Peningkatan produksi benih dan pakan ikan UPR/UP2R 3. Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin
			Meningkatkan ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan
3	Meningkatkan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	Meningkatnya pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)

Dari tahapan-tahapan penyusunan strategi-strategi menggunakan analisi swot tersebut maka dapat ditarik kesimpulan strategi oleh Dinas Perikanan guna mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah khususnya pembangunan sektor perikanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
4. Meningkatkan ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk
5. Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan

1.2. Kebijakan

Dalam melaksanakan strategi tersebut maka perlu dilaksanakan kebijakan atau arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada pendekatan pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dan memberdayakan masyarakat pembudidaya ikan/nelayan, pengolah hasil perikanan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usahanya. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan kebijakan diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi; Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan dan desa; Membangun sistem pengelolaan informasi dan layanan publik yang handal dan professional

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif;

3. Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur, Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Melaksanakan Penataan

organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah;
Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbaru

6. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Meningkatkan potensi/stok ikan tangkap di PUD;
Meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk pemulihan sumber daya ikan; Meningkatkan partisipasi kelembagaan nelayan dalam pembangunan perikanan; Meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan; perikanan Meningkatkan produksi ikan tangkap pada perairan berbasis CBF; Menghentikan sementara secara bertahap mengenai cara penangkapan dan budidaya yang tidak lestari, sehingga populasi ikan meningkat

7. Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)

Meningkatkan ragam/jenis dan jumlah populasi masing - masing jenis ikan endemik pada pusat penangkaran; Memfasilitasi pembentukan dan rapat - rapat instalasi lintas sektor (Pokja) untuk merumuskan suatu kebijakan terkait upaya penyelamatan danau yang dilakukan secara bersama - sama; Melaksanakan penyusunan draf peraturan - peraturan daerah yang terkait dengan

pengendalian dan pengawasan di perairan umum daratan;
Meningkatkan peranserta POKMASWAS dan aparaturnegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan

8. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatkan kapasitas sarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat; Meningkatkan keterampilan pembudidaya; Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya terpadu; Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya berbasis CBF; Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya miinapadi; Meningkatnya produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya kemitraan, lintas sektor (Kampung KB, P2WKSS,/BBGR, Pemerintah Desa; Meningkatkan pengawasan Perikanan Budidaya yang meliputi peredaran pakan dan obat-obatan serta kesehatan lingkungan

9. Peningkatan produksi benih dan pakan ikan UPR/UP2R

Penyediaan bantuan prasarana/sarana produksi benih untuk UPR dan Pokdakan; Meningkatkan keterampilan UPR dan Pokdakan dalam produksi benih dan pakan

10. Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin

Meningkatkan produksi bibit dan intensitas inspeksi mutu produksi benih; Meningkatkan ragam/jenis ikan, pakan yang diuji coba/ produksi, pelayanan diagnosa penyakit/ penjabatan penyakit ikan dan pengamatan kualitas air; Melaksanakan pembangunan/ pengadaan baru atau

peningkatan prasarana/sarana Balai Benih Ikan Kelansin; Tidak berkurang debit air masuk ke instalasi minimal 3 tahun ini, dan meningkatnya debit air masuk sekurang - kurangnya 3 tahun dari saat ini

11. Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan

Gemar makan ikan; Mengidentifikasi, terinvestigasi dan tersusunnya proposal perbaikan atas kasus penurunan produktivitas budidaya tertentu; Mempersiapkan ketersediaan calon instruktur sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan, ketersediaan modul ajar dan prasarana/ sarana/ peralatan penunjang pelatihan dan pelaksanaan yang berpengalaman dalam mengelola pelatihan; Meningkatkan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan dalam membuat produk; Meningkatkan kemampuan pengolah hasil perikanan dalam mengelola usaha; Meningkatkan kemandirian kelompok pengolah dalam mengolah usaha; Meningkatkan ragam jenis dan nilai produk yang dapat di pasarkan oleh kelompok pengola; Meningkatkan mutu produk perikanan

12. Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)

Melaksanakan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras sistem logistik ikan di koridor I,II dan III secara bertahap; Melaksanakan monitoring, evaluasi,investigasi pelaksanaan SLID; Melaksanakan pelayanan bongkar muat, pelelangan ikan, penarikan retribusi perikanan dan laporan data perikanan yang masuk pelabuhan semakin baik; Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan baik baru atau peningkatan (rehabilitasi) sesuai dengan RUP yang telah ditetapkan

Program Dinas pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dan Rumusan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disertai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dengan demikian Program Dinas merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja kepada pihak yang memberi amanah. Proses Perencanaan Strategis Dinas perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 - 2021 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Kapuas Hulu ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang Pemerintahan lengkap dengan tolak ukurnya.

Secara hierarkis Renstra Dinas perikanan dijabarkan secara spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pada lingkup pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk itu dalam rangka penetapan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, didahului dengan penjaringan aspirasi dari bawah yang

direpresentasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan dari desa dan kecamatan. Untuk selanjutnya dipadukan dengan rangkaian rencana program dan kegiatan aspirasi dinas yang diupayakan dalam bentuk Renstra Dinas perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana kinerja Dinas perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2021 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Kapuas Hulu ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada bidang perikanan lengkap dengan tolak ukurnya.



RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan- kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, dan kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi pencapaian visi dan misi dimana kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Untuk pencapaian sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan kerangka pendanaan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam jangka waktu 2017 - 2021 secara terperinci sebagai berikut Ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel dan pelayanan prima kepada masyarakat, sedangkan untuk Sasaran program ini adalah terwujudnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat
- b. Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik

- c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
 - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - m. Penyediaan Makanan dan minuman
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah
 - p. Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan OPD
 - q. Penyediaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa
 - r. Penyusunan Renja, RKA dan DPA
 - s. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
 - t. Pelayanan Publik
 - u. Penyediaan jasa publikasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Tujuan program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah wajib dilaksanakan oleh SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tanggung jawabkan sangat diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dan baik. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Penyediaan sarana pendukung Gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah untuk mendorong dan memotivasi pegawai agar dapat melaksanakan kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah terwujudnya disiplin pegawai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
- c. Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur adalah meningkatkan kualitas SDM Aparatur perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM Aparatur perikanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja

Tujuan program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja adalah untuk memberikan dan menyiapkan laporan akuntabilitas realisasi program dan kegiatan baik secara fisik maupun kinerja sebagai pertanggung jawaban dan kinerja SKPD kepada Kepala Daerah Sasaran program ini adalah terwujudnya pengembangan sistem pelaporan laporan kinerja dan keuangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi Anggaran
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas perikanan
- e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- f. Penyusunan pendapatan dan pengelolaan asset SKPD
- g. Montoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perikanan
- h. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
- i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD
- j. Pengembangan Data dan Informasi Perikanan
- k. Penyusunan SOP, Uraian Tugas dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- l. Fasilitasi kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

6. Program Gemar Makan Ikan

Tujuan Program Kampanye adalah Meningkatkan konsumsi ikan dalam menunjang perbaikan gizi masyarakat, Sasaran program ini adalah Meningkatnya konsumsi ikan di per kapita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Forum Gerakan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN)

7. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Ikan Tangkap

Tujuan Program Peningkatan Produksi Ikan Tangkap adalah Meningkatkan kesejahteraan nelayan, Sasaran program ini adalah Meningkatnya produksi ikan tangkap.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- b. Pemulihan sumberdaya ikan

- c. Pemberdayaan ekonomi nelayan kecil
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan nelayan
 - e. Peningkatan kualitas pemukiman kampung nelayan
 - f. Pengelolaan perikanan tangkap berbasis budidaya (culture base fisheries-CBF)
 - g. Moratorium pengelolaan perikanan yang tidak lestari dan kompensasi
 - h. Perlindungan nelayan kecil
 - i. Peningkatan saran dan prasarana usaha perikanan tangkap
8. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Tujuan Program Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah Meningkatkan kawasan dan Produksi Budidaya, Sasaran program ini adalah Meningkatkan jumlah produksi dan produktivitas perikanan Budidaya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
- c. Peningkatan sarana produksi perikanan budidaya
- d. Pengembangan kawasan budidaya air tawar
- e. Pengembangan Kawasan Budidaya Terpadu
- f. Pengembangan Kawasan Budidaya Berbasis CBF
- g. Pengembangan Kawasan Minapadi/Ugadi
- h. Peningkatan produksi kawasan budidaya kemitraan lintas sektor
- i. Peningkatan pengawasan peredaran pakan, obat –obatan dan kesehatan lingkungan
- j. Pengembangan Budidaya melalui Kemitraan Kampung KB
- k. Pengembangan Budidaya melalui Kemitraan P2WKSS dan BBGR
- l. Investigasi penanggulangan penurunan produksi budidaya

9. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Tujuan Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan adalah Meningkatnya kesejahteraan pengolah, Sasaran program ini adalah Meningkatnya ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan kulaitas Bimtek/pelatihan
- b. Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasilperikanan (tahap inkubasi)
- c. Peningkatan kapasitas opsional usaha (pasca inkubasi)
- d. Penguatan kelembagaan dan kelembagaan modal
- e. Peningkatan promosi dan akses produk perikanan (promosi hasil perikanan)
- f. Bina mutu produk perikanan

10. Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya

Tujuan Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya adalah Meningkatkan kontribusi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan Pemerintah, Sasaran program ini adalah Meningkatnya produksi benih dan pakan unit pembenihan rakyat (UPR/UP2R) dan Pembudidaya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan Kesiapan Implemetasi Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih dan Pembuatan Pakan UPR/UP2R

- c. Pelatihan/ bimbingan teknis dan pendampingan produksi dan pakan benih ikan

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan (BI) Kelansin

Tujuan Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin adalah Meningkatkan kontribusi BBI Dinas dalam penyediaan kebutuhan bibit untuk Masyarakat dan Pemerintah, Sasaran program ini adalah Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di Balai Benih.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pengelolaan operasional UPT Benih Ikan (BI) Kelansin;
- b. Pengembangan Produksi UPT Benih Ikan (BI) Kelansin;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana UPT Benih Ikan (BI) Kelansin;
- d. Penanggulangan Degradasi Sumber Daya Air UPT BI.

12. Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)

Tujuan Program Implementasi Sistem Logistik Ikan adalah Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan, Sasaran program ini adalah Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan Kesiapan Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)
- b. Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID);
- c. Pengembangan dan pengelolaan TPI
- d. Peningkatan sarana dan prasarana TPI
- e. Monitoring evaluasi dan investigasi pelaksanaan SLID

13. Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)

Tujuan Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD) adalah Mencegah berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD, Sasaran program ini adalah Meningkatkan ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Domestikasi, Penangkaran Dan Budidaya Ikan Endemik Berpotensi Langka/Punah;
- b. Optimalisasi Gerakan Penyelematan Danau;
- c. Penyusunan Raperda/ Perda Pengelolaan Dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)
- d. Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Program dan kegiatan tersebut diatas baru akan terwujud menjadi pendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu apabila tersedianya dana. Penganggaran kegiatan-kegiatan sangat diharapkan bersumber dari APBD terutama APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya kegiatan-kegiatan APBN diharapkan bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain dana pemerintah, untuk tercapainya target yang telah ditetapkan perlu didukung dari dana swasta dan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6.1. (Lampiran 1).

Program dan kegiatan tersebut diatas baru akan terwujud menjadi pendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu apabila tersedianya dana. Penganggaran kegiatan-kegiatan sangat diharapkan bersumber dari APBD terutama APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya kegiatan-kegiatan

APBN diharapkan bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain dana pemerintah, untuk tercapainya target yang telah ditetapkan perlu didukung dari dana swasta dan masyarakat.



KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

Guna mengetahui dan mengevaluasi keadaan suatu kegiatan pada Dinas Perikanan kabupaten Kapuas Hulu yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terinci, Indikator Kinerja Kinerja yang ingin dicapai tahun 2017-2021 sebagaimana tersebut pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Lainnya Dinas Perikanan
T.A 2017 - 2021

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	-	-	B	B	BB	BB	BB
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	0%	60%	62%	65%	70%	100%	100%
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	-	-	103	104	105	105
	a Angka produksi ikan tangkap (Ton/Tahun)	31.495	31,550	40,050	41,000	41,200	41,600	41,600 Ton
	b Prosentase PDRB sektor perikanan berdasarkan lapangan usaha (%)	7.85	8.85	-	-	-	-	-
	c PAD sektor perikanan (juta)	120	230	240	250	260	270	270 juta
	d Rata-rata pendapatan nelayan	1,175,000	1,200,000	-	-	-	-	-
	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Perairan Umum	0	0	0.133	0.133	0.1	0.1	0.10%
	a Jumlah keberagaman jenis ikan endemik di PUD yang tidak berkurang dari	0	0	1	1	2	2	2 Jenis
	b Jumlah ikan endemik bernilai ekonomis dan langka prioritas untuk dipertahankan pada PUD (Kg)	0	0	0	900	800	650	2.350 Kg
	c Jumlah ragam jenis ikan endemik bernilai ekonomis dan langka prioritas untuk	1	1	1	3	4	5	5 Jenis

	dipertahankan pada PUD (jenis)							
d	Jumlah unit penangkaran yang operasional (unit)	1	1	1	2	2	2	2 Unit
e	Jumlah hari operasional pengawas perikanan (hari)	72	72	72	72	72	72	72 Hari
f	Jumlah pelanggaran oleh masyarakat (kasus)	0	1	1	1	1	1	1 Kasus
g	Jumlah pelaku yang di proses (orang)	1	2	2	2	2	2	2 Orang
h	Prosentase Penurunan Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Sektor Perikanan (<i>Illegal, Unported and Ungregulated Fishing</i>)	70	70	60	50	40	20	20 Laporan
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)	-	-	-	100	101	102	102
a	Jumlah produksi ikan budidaya (Ton/tahun)	22,060	23,263	24,060	25,263	26,526	27,853	27,853 Ton
b	Jumlah kawasan budidaya yang dikembangkan (Ha)							
	- CBF	-	-	0,7	0,9	1,0	1,5	1,5 Ha
	- Minapadi	-	-	2	3	4	5	5 Ha
	- Bioplok	-	-	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0 Ha
	- Keramba (M2)	-	209,0	219,4	230,4	241,9	254,0	254,0 M2
	- Kolam	0	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9 Ha
	Persentase produksi bibit yang dapat disediakan dibanding keseluruhan bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk memenuhi belanja bibit pemerintah (proyek)	70	70	75	80	90	100	100 %
	a. Produksi UPR							
	- Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi	1	1	3	4	4	5	5 Jenis
	- Jumlah produksi (ekor)	12.000	12.100	125.000	131.250	137.813	144.703	144.703 Ekor
	- Jumlah sertifikat benih yang di dapat	0	1	2	2	4	5	13 Sertifikat
	b. Produksi benih Pembenihan Mandiri							
	- Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi	0	1	3	3	3	4	4 Jenis
	- Jumlah produksi (Ekor)	2.000.000	2.010.000	2.025.000	2.065.500	2.106.810	2.148.946	2.148.946 Ekor
	Jumlah sertifikat benih yang di dapat	0	0	0	1	1	1	3 Sertifikat
	c. Produksi Pembenih Budidaya							
	- Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi	0	1	1	1	2	3	3 Jenis
	- Jumlah produksi (ekor)	9.000	9.500	10.000	10.500	11.025	11.576	11.576 Ekor
	- Jumlah sertifikat benih yang di dapat	0	1	1	1	1	1	4 Sertifikat
	d. Produksi Pakan UPR							
	- Jumlah pakan yang di produksi oleh UP2R (Kg)	50	100	150	250	500	1.000	1.900 Kg
	Presentase produksi bibit UPT BI Kelansin terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah	15	18	20	31	39	47	47 %

	- Jumlah produksi benih (ekor)	300.000	300.000	327.226	428.933	463.312	500.377	1.719.848 Ekor
	- Jumlah ragam/jenis ikan yang dapat di produksi	5	5	7	11	13	15	15 Jenis
	- Jumlah ragam/ jenis produksi benih yang memperoleh sertifikat	0	0	0	0	0	0	0 Jenis
	- Retribusi hasil penjualan benih (PAD)			141.450 .000	150.000 .000	165.000 .000	190.000 .000	190.000.000
4	Nilai Tukar Pengolah Ikan (NTPe)	-	-	-	105	106	107	107
	a. Konsumsi Ikan/kapita/Kg/Tahun	37	37,5	38	0	0	0	0
	b. Ragam jenis produk olahan ikan yang sudah dapat di produksi	6	6	6	7	8	9	9 Jenis
	c. Persentase pertumbuhan penjualan produk hasil perikanan	0	0	0	3	5	6	6%
	d. Ragam jenis produk olahan yang sudah masuk/ di pasaran di Mini Market/ Super Market	1	1	1	1	1	2	2 Jenis
	e. Cakupan ragam jenis produk olahan yang dibina melalui kegiatan : inkubasi bisnis usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6	6	10	10	10	10	10 Jenis
	f. Ragam jenis produksi yang dipamerkan dan dibeli/dibeli	5	5	5	7	8	9	9 Jenis
	g. Keseluruhan produk yang dipamerkan	5	5	5	7	9	9	9 Produk
5	Kenaikan Ikan Segar, beku dari Produk Olahan lainnya di tingkat konsumen stabil serta nilai inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank Indonesia	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
	a Jumlah pelaku usaha logistic ikan yang dibina (orang)							
	- Nelayan di pusatproduksi	80	85	90	95	100	105	105 Orang
	- Pembudidaya (Hulu)							
	- Pengumpul	0	150	160	170	180	190	200 Orang
	- Distributor (di pusat pengepul)	0	5	10	15	20	20	20 Orang
	- Pengangkut	10	12	14	16	18	20	20 Orang
	- Distributor Buffer Stock (pusat penyangga/ penyimpanan)	2	2	2	2	2	2	2 Orang
	- Pengecer/ pedagang ikan/ ikan olahan	50	55	60	70	75	80	80 Orang
	b Jumlah Desa dan yang tersedia data dan informasi logistic ikan	7	7	7	7	7	7	7 Desa
	c Jumlah numerator data logistic ikan yang dibina sesuai wilayah kerja (unit)	7	7	7	7	7	7	7 Unit
	e Jumlah kerjasama dalam mendukung Ketersediaan ikan di lokasi sistem logistic ikan daerah (29 – 30 kerjasama)							
	- Nelayan	0	0	0	10	10	10	30 Kerjasama

- Pembudidaya	0	0	0	10	10	10	30 Kerjasama
- Pengumpul	0	0	0	5	5	5	15 Kerjasama
- Distributor pusat pengumpul	0	0	0	1	1	1	3 Kerjasama
- Operator Angkutan	0	0	0	5	5	5	15 Kerjasama
- Operator Buffer Stock	0	0	0	1	1	1	3 Kerjasama
- Pengecer/ pedagangikan/ ikanolahan	0	0	0	10	10	10	30 Kerjasama
f Jumlah sarana dan prasarana logistik ikan yang dibangun di tingkat :							
- Di tingkat produksi	0	5	3	1	1	1	10 Unit
- Di tingkat pusat pengepul	0	0	0	1	1	1	1 Unit
- Di tingkat pusat penyangga Buffer Stock	1	0	1	0	0	0	2 Unit
- Di tingkat pengecer/pedagang	0	0	0	0	0	0	0

VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 – 2021 ini dibuat untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan Perikanan 5 tahun ke depan guna mendukung program-program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan perikanan serta sebagai tolok ukur sebagaimana substansi Permendagri No.86 Tahun 2016. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas. Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kapuas Hulu. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Perikanan Kapuas Hulu. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Harapan kami semoga renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu serta penyelenggara pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIKAMAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	19					
1	Tujuan 1 Mewujudkan Dinas Perikaman yang Profesional, Akuntabel dan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	1	Meningkatnya penyelenggaraan tabakoleta Dinas Perikaman yang baik	1. Predikat SAKOP pada Dinas Perikaman	C	C			B		B		BB		BB		BB	Kepala Dinas	Dinas Perikaman			
				1. Predikat SAKOP pada Dinas Perikaman	C	C	2.992.097.500		B	2.962.768.100	B	2.966.266.100	BB	2.937.748.100	BB prediat	2.919.268.100	BB	predikat	14.716.169.900	Kepala Dinas	Dinas Perikaman	
				Cakupan Pelayanan administrasi perikaman	100%	100 %	2.111.998.500	100 %	2.173.384.100	100 %	2.074.384.100	100 %	2.074.384.100	100 %	2.074.384.100	100 %	100 %	100 %	10.568.534.900	Selektariat	Dinas Perikaman	
				Jumlah Surat yang di Kirim untuk 1 Tahun	30 Surat	30 Surat	5.800.000	30 Surat	5.800.000	30 Surat	5.800.000	30 Surat	5.800.000	30 Surat	5.800.000	100 Surat	100 %	29.000.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah Penyediaan Materi yang disediakan untuk 1 Tahun	850 Lembar	850 Lbr		850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	4.250 Bulan	100 %	371.880.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah pemeliharaan (jin surat) pada nomor kendaraan dinas roda 4 Dinas Perikaman	3 STNK	3 STNK	5.000.000	3 STNK	3.000.000	3 STNK	3.000.000	4 STNK	3.000.000	4 STNK	3.000.000	4 STNK	17.000.000	17.000.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Prosentase Pengelolaan Keuangan Dinas Perikaman yang ditanggung dan dibebaskan Tugas Sesuai Tapalnet	100%	100%	116.580.000	100%	113.580.000	100%	113.580.000	100%	113.580.000	100%	113.580.000	100%	113.580.000	570.900.000	Subbag Keuangan	Dinas Perikaman		
				Luas Lingkungan Kantor dan Gedung yang Dijaga	2.241 m2	2.241 m2	103.000.000	2.241 m2	102.913.600	2.241 m2	102.913.600	2.241 m2	102.913.600	2.241 m2	102.913.600	2.241 m2	102.913.600	514.654.400	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Luas Lingkungan Kantor dan Gedung yang Dibersihkan	1.337 m2	1.337 m2		1.337 m2		1.337 m2		1.337 m2		1.337 m2		1.337 m2						
				Jumlah Pemenuhan Service Perawatan Kerja	12 Bulan	12 Bulan	21.200.000	12 Bulan	14.200.000	12 Bulan	14.200.000	12 Bulan	14.200.000	12 Bulan	14.200.000	60 Bulan	100 %	200.542.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah Item Alat Tulis Kantor untuk 1 Tahun	15 Item	15 Item	38.108.500	15 Item	38.108.500	15 Item	38.108.500	15 Item	38.108.500	15 Item	38.108.500	15 Item	38.108.500	283.500.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah Penyediaan Materi yang disediakan untuk 1 Tahun	850 Lembar	850 Lbr		850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	850 Lbr	4.250 Lbr	100 %					
				Prosentase Karu/Uang Hias, Spanduk, Umbul-umbul dan biaya fotocopy dan perjalanan yang disediakan	100%	100 %	24.000.000	100 %	15.265.000	100 %	15.265.000	100 %	15.265.000	100 %	15.265.000	100 %	15.265.000	100 %	86.000.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman	
				Prosentase Alat tulis dan Perawatan Kantor 1 Tahun	100%	100 %	5.000.000	100 %	3.625.000	100 %	3.625.000	100 %	3.625.000	100 %	3.625.000	100 %	3.625.000	19.500.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Prosentase Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	20%	35 %	66.990.000	40 %	66.990.000	50 %	66.990.000	60 %	66.990.000	80 %	66.990.000	80 %	66.990.000	334.950.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah reff tabung gas untuk 1 Tahun	12 Tabung	12 Tabung	2.520.000	12 Tabung	2.520.000	12 Tabung	2.520.000	12 Tabung	2.520.000	12 Tabung	2.520.000	60 Tabung	100 %	12.600.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah Pengisian Baterai dan Perawatan	12 Bulan	12 Bulan	19.800.000	12 Bulan	19.800.000	12 Bulan	19.800.000	12 Bulan	19.800.000	12 Bulan	19.800.000	60 Bulan	100 %	99.000.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Biaya makan minum halan pegawai, tamu dan biaya rapat untuk 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	108.000.000	1 Tahun	108.000.000	1 Tahun	108.000.000	1 Tahun	108.000.000	5 Tahun	100 %	557.000.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah Perijinan dinas luar Daerah bagi pegawai dinas perikaman	140 OK	137 OK	656.000.000	140 OK	706.307.000	140 OK	706.307.000	140 OK	706.307.000	140 OK	706.307.000	697 OK	100 %	3.481.228.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman		
				Jumlah Perijinan dinas dalam Daerah bagi pegawai dinas perikaman untuk 1 tahun	153 OK	153 OK	136.000.000	153 OK	144.838.000	153 OK	144.838.000	153 OK	144.838.000	153 OK	144.838.000	153 OK	144.838.000	765 OK	100 %	714.352.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikaman
				Jumlah Dokumen Arsip yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	42.000.000						90 Naskah	42.000.000			Subbag Program	Dinas Perikaman		
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	22.000.000						90 Naskah	22.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000						90 Naskah	35.000.000						
				Jumlah Dokumen ARK yang disusun tepat waktu	0	0		90 Naskah	35.000.000		</											

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Pemangku Jawab	Lokasi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19					
1	Tujuan 1																					
			c. Pengukuran Benih Ikan	3 Jumlah unit yang tersalurkan	0	Benih	0	Benih	3730	Benih	4500	Benih	3500	Benih	13470							
			d. Pengukuran Benih Pakan Ikan	4 Jumlah unit yang tersalurkan	0	Kelompok	0	Kelompok	14	Kelompok	15	Kelompok	10	Kelompok	35							
			e. Pengukuran Benih Waring	5 Jumlah unit yang tersalurkan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0							
			3 Teknik Budidaya Mipapadi																			
			a. Jenis Benih Ikan	1 Jumlah yang tersalurkan	0	Jenis	0	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	2	Jenis	8							
			b. Jenis Benih Padi	2 Jumlah yang tersalurkan	0	Jenis	0	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	2	Jenis	8							
			c. Matrik Tanam	3 Jumlah yang tersalurkan	0	Matrik	0	Matrik	3	Matrik	3	Matrik	2	Matrik	8							
			d. Model Tanaman	4 Jumlah yang tersalurkan	0	Model	0	Model	3	Model	3	Model	2	Model	8							
			e. Pengalihan Air	5 Jumlah yang tersalurkan	0	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	2	Unit	8							
			f. Pemberian Pakan	6 Jumlah yang tersalurkan	0	Pakan	0	Pakan	3	Pakan	3	Pakan	2	Pakan	8							
			g. Panen	7 Jumlah yang tersalurkan	0	Panen	0	Panen	3	Panen	3	Panen	2	Panen	8							
			4 Pengendalian Hama																			
			a. Pengendalian Hama Padi	1 Jumlah yang tersalurkan	0	Hama	0	Hama	3	Hama	3	Hama	2	Hama	8							
			b. Pengendalian Hama Ikan	2 Jumlah yang tersalurkan	0	Hama	0	Hama	3	Hama	3	Hama	2	Hama	8							
			5 Monitoring dan Evaluasi																			
			a. Monitoring	1 Jumlah kegiatan terlaksana	0	Kali	0	Kali	3	Kali	3	Kali	2	Kali	8							
			b. Evaluasi	2 Jumlah kegiatan terlaksana	0	Kali	0	Kali	3	Kali	3	Kali	2	Kali	5							
			c. Pelaporan	3 Jumlah kegiatan terlaksana	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3							
			6 Kegiatan Peningkatan produksi kawasan budidaya Mekaritan Liris Bekas	1 Pembinaan dan pendampingan	0	%	0	%	0,5	%	100.000,00	0,5	%	100.000,00	0,5	%	100.000,00	1,5	%	300.000,00	Saha Pembudayaan dan Perlinggungan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan	Dinas Perikanan
			2 Pengataan/penyediaan/teknis sarana dan prasarana perikanan budidaya	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	3								
			7 Kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran pakan obat-obatan dan kesehatan lingkungan	1 Berkurangnya penyebaran penyakit ikan dalam ragam dan jenis (%)	0	Penyakit	0	Penyakit	15	Penyakit	100.000,00	20	Penyakit	100.000,00	30	Penyakit	100.000,00	65	Penyakit	300.000,00	Saha Pembudayaan dan Perlinggungan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan	Dinas Perikanan
			2 Berkurangnya jumlah pakan yang tidak layak edar (%)	0	Pakan	0	Pakan	15	Pakan	20	Pakan	30	Pakan	65	Pakan							
			3 Berkurangnya jumlah obat-obatan yang tidak layak edar (%)	0	Obat	0	Obat	15	Obat	20	Obat	30	Obat	65	Obat							
			4 Jumlah temuan pakan yang tidak layak edar sesuai SNI	0	Temuan	0	Temuan	6	Temuan	4	Temuan	3	Temuan	13	Temuan							
			5 Jumlah temuan obat-obatan yang tidak layak edar sesuai SNI	0	Temuan	0	Temuan	25	Temuan	20	Temuan	20	Temuan	75	Temuan							
			6 Jumlah temuan penyakit ikan yang terkait dengan habitat lingkungan budidaya	0	Temuan	0	Temuan	3	Temuan	3	Temuan	3	Temuan	9	Temuan							
			8 Investigasi penanggulangan penurunan produksi budidaya	1 Jumlah usaha budidaya yang teridentifikasi / terinvestigasi pasca penurunan produktivitas	0	Usaha	0	Usaha	0	Usaha	2	Usaha	100.000,00	2	Usaha	100.000,00	4	Usaha	200.000,00	Kepala Kasi Pengendalian Pembudayaan Ikan	Dinas Perikanan	
			2 Jumlah laporan investigasi yang dapat disusun	0	Proposal	0	Proposal	0	Proposal	1	Proposal	1	Proposal	2	Proposal							
			3 Jumlah proposal yang dapat diidentifikasi ke dalam forum seminar FGD	0	Proposal	0	Proposal	0	Proposal	1	Proposal	1	Proposal	2	Proposal							
			4 Jumlah laporan FGD yang dapat diidentifikasi dalam Penganggaran (RKA)	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan							

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Pemangku Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya			1 Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)	na	na	na	na	100	na	101	na	102	na	102	na	na	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
			9 Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPRUPZR dan Pembudidaya	1 Produksi UPR	na	84.987,720	na	61.000,000	na	643.000,000	na	238.000,000	na	285.000,000	na	1.388.987,720	na	Kepala Bidang Pembudayaan Budidaya	Dinas Perikanan	
				- Jumlah ragam jenis benih ikan yang dapat di produksi	0	0	0	0	3	7.500,000	4	8.000,000	4	8.500,000	11	24.000,000				
				- Jumlah produksi (dalam ekor benih)	0	0	0	0	125.000	0	131.250	0	137.813	0	394.063	0	8			
				- Jumlah sertifikat pembenihan yang didapat	0	0	0	0	2	2 Sertifikat	2	2 Sertifikat	4	4 Sertifikat	8	8 Sertifikat				
				2 Produksi benih Pembentahan Mandiri																
				- Jumlah ragam jenis benih ikan yang dapat di produksi	1	5.000,000	2	7.500,000	3	15.000,000	3	22.500,000	3	35.000,000	12	85.000,000				
				- Jumlah produksi (dalamekor benih)	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	2.025.500	2.025.000	2.028.10	2.028.10	6.197.310	2	-			
				- Jumlah sertifikat pembenihan yang didapat	-	-	-	-	1	1 Sertifikat	1	1 Sertifikat	1	1 Sertifikat	200.000,000	2	200.000,000			
				3 Produk Benih Pembudidaya																
				- Jumlah ragam jenis benih ikan yang dapat di produksi	-	-	-	-	1	1 Jenis	1	1 Jenis	2	2 Jenis	4	4 Jenis				
				- Jumlah produksi (dalamekor benih)	8.000	8.000	9.000	10.000	10.500	10.500	11.025	11.025	11.025	11.025	48.525	4	-			
				- Jumlah sertifikat pembenihan yang didapat	-	-	-	-	1	1 Sertifikat	1	1 Sertifikat	1	1 Sertifikat	3	3 Sertifikat				
				4 Produk Pakan UPR	-	-	-	-	150	150 Kg	250	250 Kg	500	500 Kg	900	900 Kg				
				- Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh UPR	-	-	-	-	150	150 Kg	250	250 Kg	500	500 Kg	900	900 Kg				
			1 Peningkatan Kestapan Implementasi Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPRUPZR dan Pembudidaya	Tertakapnya Kestapan Implementasi Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPRUPZR dan Pembudidaya	100	40.000,000	100	38.000,000	100	48.000,000	100	21.000,000	100	25.000,000	100	172.000,000	na	Saha Pembudayaan dan Perlinggungan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan	Dinas Perikanan	
			1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan UPRUPZR	- Realisasi Dokumen Rencana Induk pengembangan UPRUPZR yang disahkan oleh KADIS	-	-	3	Rancangan	3.000,000	5	5.000,000	7	7.000,000	8	8.000,000	23	23.000,000			
			2) Belajar Penyusunan Profil UPR dan Pembentahan Mandiri	- Tersedianya profil UPR yang sudah lengkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3) Pengusunan Draft KADRET dan Struktur Ketenagakerjaan UPRUPZR yang relevan dan berorientasi bisnis	- Realisasi Dokumen KADRET dan Struktur Ketenagakerjaan UPRUPZR yang relevan dan Berorientasi Bisnis yang disahkan oleh KADIS	-	-	-	-	3	3.000,000	4	4.000,000	5	5.000,000	12	12.000,000				
			4) Penyusunan Materi/ Bahan Ajar Sosialisasi pendampingan usaha	- Realisasi Dokumen Materi/ Bahan Ajar Sosialisasi pendampingan usaha yang disahkan oleh KADIS	10	25.000,000	15	5.000,000	25	8.000,000	30	10.000,000	35	12.000,000	107	60.000,000				
			5) Penyusunan Rencana Lokasi dan Kelompok Sasaran melalui survey lapangan	- Data Prodi lokasi dan kelompok sasaran penerima manfaat	2	2 Data Lokasi UPR	3	3 Data Lokasi UPR	2	2 Data Lokasi Pakan	1	1 Data Lokasi Pem. Mandiri	1	1 Data Lokasi Pem. Mandiri	1	1 Data Lokasi Pakan	1	1 Data Lokasi Pakan		
			6) Pelaksanaan Sosialisasi Program	- Fraksone sosialisasi yang dilaksanakan terhadap calon kelompok sasaran	4	4 Kelompok	8	8 Kelompok	4	4 Kelompok	4	4 Kelompok	-	-	16	16 Kelompok				
			2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembentahan dan Pembuatan Pakan UPRUPZR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembentahan dan Pembuatan Pakan UPRUPZR	100	10.000,000	100	na	100	340.000,000	100	235.000,000	100	210.000,000	100	795.000,000	na	Saha Pembudayaan dan Perlinggungan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan	Dinas Perikanan	
			1) Sarana dan Prasarana Pembentahan																	
				- Tandon Air	-	-	-	-	1	40.000,000	-	-	-	-	1	40.000,000				
				- Kolam	-	-	-	-	4	150.000,000	1	150.000,000	1	150.000,000	6	450.000,000				
				- Hatchery	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
				- Aquarium	-	-	-	-	30	40.000,000	30	30	30	40.000,000	90	120.000,000				
				- Matrik Aquarium	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	6	6				
				- Genrat	-	-	-	-	1	1 Unit	1	1 Unit	1	1 Unit	3	3 Unit				
				- Mesin Sedot Air	-	-	-	-	1	1 Unit	1	1 Unit	1	1 Unit	3	3 Unit				
				- Pagar	-	-	-	-	1	20.000,000	1	1	1	1	3	60.000,000				
				- Saluran Irigasi	-	-	-	-	200	200 Meter	0	0	0	0	0	0				
			2) Sarana Pendukung Pembentahan																	
				- Indukan	-	-	-	-	1.200	15.000,000	0	0	25.000,000	-	1.200	40.000,000				
				- Pengalihan Pengalihan	-	-	-	-	3	75.000,000	0	0	0	0	5	85.000,000				
				- Obor	0	10.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.000,000				
				- Altimeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.000,000				
				- Jarum Suntik	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10				
			3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi UPR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Benih dan Pembuatan Pakan UPRUPZR	100	225.000,000	100	na	100	50.000,000	100	50.000,000	100	na	100	275.000,000	na	Saha Pembudayaan dan Perlinggungan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan	Dinas Perikanan	
			1) Paket Mesin Pembuatan Pakan	-	-	-	-	-	1	150.000,000	-	-	-	-	1	150.000,000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Pemanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19			
1	Tujuan 1																			
			2) Kerjasama penelitian, pengembangan dan prakira lapangan dalam pembantuan pakan	- Realisasi produk pakan alami yang dihasilkan	1 Jenis	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	5 Jenis	-			
				- Realisasi produk pakan buatan yang dihasilkan	-	- Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	Jenis	-	Jenis	-	2 Jenis	-			
				- proposi keragaman pakan alami yang dihasilkan terhadap jumlah keseluruhan produk pakan alami	-	- Komoditas	-	1 Komoditas	-	1 Komoditas	-	1 Komoditas	-	1 Komoditas	-	4 Komoditas	-			
				- proposi keragaman pakan alami yang dihasilkan terhadap jumlah keseluruhan produk pakan buatan	-	- Komoditas	-	1 Komoditas	-	1 Komoditas	-	1 Komoditas	-	1 Komoditas	-	4 Komoditas	-			
			3) Kerjasama penelitian, pengembangan dan prakira kerja lapangan/ magang dalam pengamatan, pengamatan, pemeliharaan laboratorium :																	
			- Pemantauan telur	- angka keragaman jenis ikan yang sudah berhasil dilakukan pengamatan/ pemantauan telur	3 Komoditas	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	15 Komoditas	-			
			- Pengamatan larva	- Angka keragaman jenis ikan yang sudah dapat diamati	3 Jenis	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	3 Komoditas	-	15 Komoditas	-			
			- Pengamatan Pemeliharaan Hama dan Penyakit Ikan	- keragaman jenis hama dan penyakit ikan yang sudah dapat dipecah	9 Jenis	9 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	17 Jenis	-			
			- Pengamatan Kualitas Air (Mau Air) berdasarkan PP No. 82 Tahun 2000	- Ketetapan Substansi (parameter kimia dan fisika) air yang dapat diukur/diikuti	5 Parameter	5 Parameter	-	4 Parameter	-	3 Parameter	-	2 Parameter	-	2 Parameter	-	10 Parameter	-			
			4) Kerjasama dalam sertifikasi mutu benih	- Jumlah Komoditi yang telah lulus dan mendapat sertifikasi mutu benih dari lembaga/badan yang berwenang	2 Jenis	2 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	6 Jenis	-			
			5) Kerjasama dalam pemasaran benih secara online	- Jumlah pembelian benih yang difasilitasi melalui media online secara online	-	- Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	4 Jenis	-			
			6) Kerjasama dalam penyusunan masterplan kawasan, ekleplan dan DED sarana dan prasarana	- Jumlah produk rancang bangun yang dapat dihasilkan	2 Jenis	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	10 Jenis	-			
			3 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT- Benih Ikan (Bi) Kelantan		0					4.680.007,858		4.680.007,858		4.680.007,858		14.040.203,958		Kepala UPT (B)	Dinas Perikanan	
			- Pengadaan Alat-alat Laboratorium Penelitian UPT-Bi Kelantan	Jumlah alat laboratorium yang di sediakan	0 Paket	- Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-			
			- Pengadaan Paket Pendereran UPT-Bi Kelantan	Jumlah alat Pendereran yang dapat disediakan	0 Paket	- Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-			
			- Pengadaan Alat-alat Pengukuran Derat Spesies Malar UPT-Bi Kelantan	Jumlah alat pengangkutan yang disediakan	0 Paket	- Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-			
			- Pengadaan Perlatan Panen UPT-Bi Kelantan	Jumlah alat panen yang disediakan	0 Paket	- Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-			
			- Pengadaan Sistem Listrik Panel Surya UPT-Bi Kelantan	Jumlah sistem listrik panel surya yang tersedia	0 Unit	- Unit	-	Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	30 Unit	-			
			- Pengadaan Perlatan dan Meubelair Kantor UPT-Bi Kelantan	Jumlah Perlatan meubelair yang dapat disediakan	0 Paket	- Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-			
			- Pengadaan Sistem Jaringan Internet Kantor UPT-Bi Kelantan	Jumlah unit sistem jaringan internet	0 Paket	- Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-			
			- Lanjutan Pengadaan Konstruksi Jalan / Rabat Beton UPT-Bi Kelantan	Panjang jalan yang dibangun	0 M2	- M2	-	M2	-	400 M2	-	400 M2	-	400 M2	-	1.200 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan UPT-Bi Kelantan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dibangun	0 M2	- M2	-	M2	-	480 M2	-	480 M2	-	480 M2	-	1.440 M2	-			
			- Pengadaan Showroom Ikan UPT-Bi Kelantan	Jumlah showroom yang dibangun	0 M2	- M2	-	M2	-	160 M2	-	160 M2	-	160 M2	-	480 M2	-			
			- Pengadaan Taman Land Scaping UPT-Bi Kelantan	Luas taman land scaping yang dibangun	0 M2	- M2	-	M2	-	170 M2	-	170 M2	-	170 M2	-	510 M2	-			
			- Lanjutan Pengadaan Pagar Keliling UPT-Bi Kelantan	Panjang Pagar Keliling yang dibangun	0 M2	- M2	-	M2	-	190 M2	-	190 M2	-	190 M2	-	570 M2	-			
			- Pembuatan dan Rehabilitasi kolam induk UPT-Bi Kelantan	luas pembuatan/rehabilitasi kolam induk	0 M2	- M2	-	M2	-	430 M2	-	430 M2	-	430 M2	-	1.290 M2	-			
			- Pembuatan dan Rehabilitasi kolam Pendereran UPT-Bi Kelantan	Luas kolam pendereran yang dibangun/rehabilitasi	0 M2	- M2	-	M2	-	430 M2	-	430 M2	-	430 M2	-	1.290 M2	-			
			- Pembuatan dan Rehabilitasi kolam induk UPT-Bi Kelantan	Luas kolam induk yang di bangun/rehabilitasi	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Rehabilitasi Kolam / Bak Filter/pengendapan UPT-Bi Kelantan	luas kolam/bak filter/pengendapan yang direhabilitasi	0 M2	- M2	-	M2	-	415 M2	-	415 M2	-	415 M2	-	1.245 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Rumah Packing dan Pemasangan Posesil UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi rumah Packing	0 M2	- M2	-	M2	-	60 M2	-	60 M2	-	60 M2	-	180 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Aula UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi Aula	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Kantor UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi Kantor	0 M2	- M2	-	M2	-	170 M2	-	170 M2	-	170 M2	-	510 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Meas UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi Meas	0 M2	- M2	-	M2	-	130 M2	-	130 M2	-	130 M2	-	390 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Pasar Benih Ikan UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi Pasar Benih Ikan	0 M2	- M2	-	M2	-	140 M2	-	140 M2	-	140 M2	-	420 M2	-			
			- Pengadaan Lanjutan Rehabilitasi Bangsal Pemijahan UPT-Bi Kelantan	Luas Lanjutan Rehabilitasi Bangsal Pemijahan	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Pengadaan Rehabilitasi Rumah Staf UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi Rumah Staf	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Pengadaan Rumah Operasional Kepala UPT-Bi Kelantan	Luas pembangunan rumah operasional kepala (BB)	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Rehabilitasi Pagar Kantor UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi Pagar Kantor	0 M2	- M2	-	M2	-	250 M2	-	250 M2	-	250 M2	-	750 M2	-			
			- Rehabilitasi Pagar Bangsal Pemijahan UPT-Bi Kelantan	Luas Rehabilitasi pagar Kantor	0 M2	- M2	-	M2	-	170 M2	-	170 M2	-	170 M2	-	510 M2	-			
			- Pengadaan Peningkatan Gudang Pakan UPT-Bi Kelantan	Luas peningkatan pembangunan gudang pakan	0 M2	- M2	-	M2	-	140 M2	-	140 M2	-	140 M2	-	420 M2	-			
			- Pengadaan Ruang Kultur Pakan Alami UPT-Bi Kelantan	luas pembangunan ruang kultur pakan alami	0 M2	- M2	-	M2	-	80 M2	-	80 M2	-	80 M2	-	240 M2	-			
			- Pengadaan Gudang Peraklan UPT-Bi Kelantan	luas pembangunan gudang peraklan	0 M2	- M2	-	M2	-	80 M2	-	80 M2	-	80 M2	-	240 M2	-			
			- Pengadaan Gudang Mesin UPT-Bi Kelantan	luas pembangunan gudang mesin	0 M2	- M2	-	M2	-	80 M2	-	80 M2	-	80 M2	-	240 M2	-			
			- Pengadaan Rumah Staf UPT-Bi Kelantan	luas pembangunan rumah staf	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Pengadaan Hatchery Udang Galah UPT-Bi Kelantan	luas pembangunan hatchery udang galah	0 M2	- M2	-	M2	-	180 M2	-	180 M2	-	180 M2	-	540 M2	-			
			- Peningkatan Hatchery Bots UPT-Bi Kelantan	luas peningkatan pembangunan Hatchery bots	0 M2	- M2	-	M2	-	150 M2	-	150 M2	-	150 M2	-	450 M2	-			
			- Pengadaan Ruang Karantina UPT-Bi Kelantan	Luas pembangunan ruang karantina	0 M2	- M2	-	M2	-	50 M2	-	50 M2	-	50 M2	-	150 M2	-			
			4 Peningkatan Degradasi Sumber Daya Air UPT - Balai Ikan (Bi) Kelantan		Dokumen					1 Dokumen								Kepala UPT (B)	Dinas Perikanan	
				- Dokumen Laporan Realisasi Luasan Kawasan Sumber Mabu Air Yang Dapat Dibebaskan (1 target Luasan + 2 Hektar)	Dokumen	- Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-			
				- Dokumen Laporan Realisasi Luasan Kawasan Yang Dapat Ditaklukkan Sebagai Kawasan Perlindungan Sumber Air UPT-Bi Kelantan	Dokumen	- Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Target				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Tujuan 1					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	
				- Dokumen Laporan Realisasi Luasan Kawasan Terancam Kritis Yang Dapat Ditangani Pohon Kembali (Target Luasan = 0,25 Hektar)	Dokumen	- Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen			
				- Dokumen Laporan Debit Air Masuk ke Instalasi LPT Berhiksan (B) Kalurahan Yang Dapat Dicapai (Target = 2 Liter/Detik)	Dokumen	- Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen			
				- Pengadaan Tanah Hutan Keperluan Pemertihan Kabupaten Kapuas Hulu	M2	- M2	-	-	-	5.000 M2	-	-	-	-	-	-	5.000 M2			
				- Pembuatan dan Pemasangan papan reklame peralangan perumahan hutan	Paket	- Paket	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-	1 Paket			
			3	Pengelolaan Udag Galah	Dokumen	- Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	216.565.000	Dokumen	216.565.000	Dokumen	216.565.000	1 Dokumen	216.565.000	Kepala UPT B	Dinas Perikanan	
				1. Dokumen Laporan Pembesaran Calon Induk Udag Galah Air Tasear	Dokumen	- Dokumen	-	-	-	1 Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen				
				2. Dokumen Laporan Pengelolaan Produk Benih Benur Lobster Air Tasear Tersekt	Dokumen	- Dokumen	-	-	-	1 Dokumen		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen				
				Pembentukan Tim Penyusunan Modul bersama Dijen Buidaya	orang	- orang	-	-	-	4 orang		orang		orang		12 orang				
				Tim Penyusunan TOR Desiminas Pemertihan Udag Galah besama	orang	- orang	-	-	-	3 orang		orang		orang		9 orang				
				Tim Kegiatan Diseminasi teknologi pemertihan Udag Galah di Kabupaten	orang	- orang	-	-	-	10 orang		orang		orang		30 orang				
				Pengadaan pakan calon induk udang galah	kg	- kg	-	-	-	220 kg		kg		kg		660 kg				
				Pengadaan Calon Induk Udag Galah LPT di Kelaman	pasang	- pasang	-	-	-	30 pasang		pasang		pasang		90 pasang				
			4	Meningkatnya Pendapatan Pengolah						185		186		187		187				
				1 Nilai Tukar Pengolah Hasil (NTP)	nil	nil														
				8 Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan						86.189.250		120.287.450		4.490.146.000		7.254.750.000		8.850.000.000	13.278.877.700	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan TPI
				- Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah						- Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		
				- Persentase pertumbuhan penjualan produk hasil perikanan						- %		3 %		5 %		6 %		6 %		
				1 Kegiatan peningkatan kualitas Bimtek/pelatihan								651.113.000		3.478.000.000		4.155.000.000		6.276.113.000	Kepala Seksi Kelembagaan	
				- Jumlah calon instruktur Dinas yang lulus pelatihan calon instruktur (CI-T)		- Orang				- Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		
				- Persentase bidang keahlian yang dikuasai instruktur Dinas dibandingkan jumlah keseluruhan bidang keahlian yang		- %				- %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				2 Modul ajar :																
				- Jumlah modul ajar yang tersusun		- Modul				- Modul		1 Modul		1 Modul		1 Modul		1 Modul		
				- Persentase modul ajar yang tersusun dibandingkan jumlah keseluruhan modul ajar yang direncanakan dalam pelatihan		- %				- %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				3 Jumlah ASN yang dilaksanakan pada pelatihan manajemen diklat pengalihan ikan		- Orang				- Orang		4 Orang		5 Orang		6 Orang		6 Orang		
				4 Prasarana sarana peralatan penunjang																
				- Jumlah paket prasarana/sarana/peralatan penunjang yang		- Paket				- Paket		1 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		
				- Nilai paket/prasarana/sarana/peralatan penunjang yang		- Paket				- Paket		1 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		
				- Persentase nilai paket yang direalisasikan dibandingkan keseluruhan nilai paket yang direncanakan pada akhir Renstra		- %				- %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas kompetensi dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)								187.361.000		918.000.000		1.136.000.000		2.161.361.000	Kepala Seksi Kelembagaan	
				Keluaran :																
				- Jumlah peserta yang terlatih (Julus beresfiliasi)	0	- Orang				- Orang		60 Orang		70 Orang		80 Orang		80 Orang		
				- ragam keahlian peserta terlatih (Julus beresfiliasi)	0	- Jenis				- Jenis		3 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		
				1) Peningkatan Kesiapan Implementasi Kegiatan																
				- Penyusunan TOR	0	- Peserta				- Peserta		20 Peserta		30 Peserta		40 Peserta		70.000.000	180.000.000	
				- Pembentukan Tim Penyusun Juknis	0	- unit				- unit		30 unit		40 unit		50 unit		500.000.000	1.200.000.000	
				- Penyusunan Juknis																
				2) Pelatihan Bimtek Usaha Produk Olahan Ikan	0	- Orang				- Orang		5 Orang		6 Orang		7 Orang		56.000.000	144.000.000	
				a) Rekrutmen Calon Peserta Pelatihan/ Bimtek								5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		50.000.000	150.000.000	
				- Keragaman dan jenis pelatihan yang diikuti oleh petaku usaha	0	- Jenis				- Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		50.000.000	150.000.000	
				b) Penyelenggaraan Pelatihan								2 Jenis		2 Jenis		3 Jenis		300.000.000	700.000.000	
				- Realisasi jenjang pelatihan yang dapat dilaksanakan sendiri dan atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan	0	- Jenis				- Jenis		200.000.000		2 Jenis		300.000.000		700.000.000		
				c) Bimtek	0	- Orang				- Orang		10 Orang		10 Orang		100.000.000		300.000.000	300.000.000	
				- Realisasi jumlah peserta yang dapat difasilitasi/dilatih pada pusat pelatihan laur daerah	0	- Orang				- Orang		10 Orang		10 Orang		100.000.000		300.000.000		
				d) Magang	0	- jenis				- jenis		2 jenis		3 jenis		40.000.000		160.000.000		
				- Realisasi Keragaman jenis pelatihan yang dapat difasilitasi pada pusat-pusat pelatihan laur daerah	0	- jenis				- jenis		40.000.000		3 jenis		60.000.000		160.000.000		
				e) Studi Banding	0	- Jenis				- Jenis		3 Jenis		3 Jenis		60.000.000		160.000.000		
				- Realisasi kunjungan ke Perusahaan atau Tempat Produksi	0	- Jenis				- Jenis		3 Jenis		3 Jenis		60.000.000		160.000.000		
				3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operasional/Usaha (Pusat Inkubasi)								114.172.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000	Seksi Kelembagaan Perikanan	
				1) Apresiasi Kelembagaan	0	- Kali				- Kali		3 Kali		3 Kali		30.000.000		90.000.000		
				- Realisasi jumlah kunjungan perkelompok pada masing-masing jenis pendampingan	0	- Kali				- Kali		3 Kali		3 Kali		30.000.000		90.000.000		
				2) Apresiasi Produksi dan Pemasaran	0	- Dokumen				- Dokumen				70 %		80 %		80 %		
				- Terwujudnya Bisnis Plan	0	- Dokumen				- Dokumen				70 %		80 %		80 %		
				3) Pendampingan	0	- Kelompok				- Kelompok				- Kelompok		- Kelompok		- Kelompok		
				- Realisasi jumlah kelompok dengan produk yang dapat di komersial	0	- Kelompok				- Kelompok				- Kelompok		- Kelompok		- Kelompok		
				4) Penyajian Apresiasi Legalitas Usaha (BPOM/ Halal)	0	- Kelompok				- Kelompok				- Kelompok		- Kelompok		- Kelompok		
				- Realisasi jumlah kelompok yang terfasilitasi sertifikasi BPOM/ Halal	0	- Kelompok				- Kelompok				- Kelompok		- Kelompok		- Kelompok		
				- Jumlah kelompok yang mendapat label halal		- Kelompok				- Kelompok				- Kelompok		- Kelompok		- Kelompok		
				4 Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pemertihan	0					60 %	1.000.000.000	70 %	1.000.000.000	80 %	1.000.000.000	80 %	3.000.000.000	Seksi Kelembagaan Perikanan		
				- Rasio jumlah nilai bantuan pada masing-masing pelaku usaha terhadap keseluruhan sumber perikanan yang	0					60 %	1.000.000.000	70 %	1.000.000.000	80 %	1.000.000.000	80 %	3.000.000.000			
				1 Bantuan Pemertihan Pemula	0	- Kelompok				- Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		1.000.000.000		60 Kelompok	3.000.000.000	
				- Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	0	- Kelompok				- Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		1.000.000.000		60 Kelompok	3.000.000.000	
				5 Promosi Hasil Perikanan						86.189.250		120.287.450		927.000.000		927.000.000		2.997.466.700	Seksi Kelembagaan Perikanan	
				1) Pemasaran																
				- Keragaman produk yang dipamerkan pada setiap event	4 Produk	- Produk				- Produk		5 Produk		4 Produk		20.000.000		13 Produk	60.000.000	
				- Keragaman Produk yang dipamerkan pada masing-masing kelompok produk	2	- Macam				- Macam		2 Macam		2 Macam		5.000.000		6 Macam	15.000.000	

